

Misi ketiga : Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.

1. Terwujudnya penambahan usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya penambahan usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha) dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah bidang usaha sektor riil yang berkembang	4371	3750	1300	3093	238%	1400

- b. Perkembangan bidang usaha sektor riil di Kota Magelang pada tahun 2014 sebanyak 3093 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2013. Angka ini menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah bidang usaha sektor riil yang berkembang di tahun 2013 yang tercatat sebanyak 3.750 dan tahun 2012 sebanyak 4.371 bidang usaha. Usaha sektor riil ini merupakan gabungan semua usaha di Kota Magelang yang terdiri dari koperasi sejumlah 207 koperasi, 2868 usaha mikro kecil dan 18 usaha menengah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.378.331.390,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.391.548.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 14,67% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 238%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kerakyatan dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	898	898	1150	900	78,26%	1300

- b. Bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam hal ini UMKM, kendala yang dihadapi dari waktu ke waktu dibidang permodalan diantaranya adalah keterbatasan akses atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formal bantuan kredit bank, misalnya proposal bisnis, pemenuhan agunan, dan sejumlah kelengkapan administratif lainnya. Kesulitan permodalan usaha juga berdampak pada kurangnya produktivitas usaha.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 735.259.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 810.424.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 90,72% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 78,26%.

3. Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang dengan capain indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2013	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	181 PKL	238 PKL	355	418	117,75%	310

- b. Padatahun 2013 telah dilaksanakan terhadap 238 PKL yang tersebar di Kota Magelang yaitu kawasan Alun-alun, Jalan Sigaluh, Kuliner Sejuta Bunga, Jalan Tidar I (pagi) dan Jalan Tidar II (malam), Jalan Pahlawan.

Penataan PKL yang dilakukan meliputi penataan dalam hal tempat dasaran, lokasi berjualan, fasilitas/sarana prasarana (seperti penyediaan shelter, meja kursi, tenda, gerobak, listrik, air dan sebagainya) maupun penataan berkaitan dengan waktu berjualan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Terdapat 6 (enam) kawasan khusus bagi para PKL yang telah disediakan dan ditata oleh Pemerintah Kota Magelang, yaitu:

1. Kuliner Tuin Van Java di kawasan Alun-alun
2. Kuliner Sejuta Bunga di kawasan Shopping centre
3. Puri Boga Kencana di kawasan Sub Terminal Kebonpolo
4. Kartika Sari di kawasan Stadion Abu Bakrin
5. Kawasan Kuliner Taman Badaan
6. Kawasan Armada Estate

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 153.040.720,00 dari anggaran sebesar Rp. 174.043.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 87,93% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 117,75 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	10	10	5	5	100%	26
2	Jumlah Paguyuban PKL	10	10	5	11	100%	26
Rata-rata Capaian Kinerja						100%	

- b. Kelembagaan PKL dibentuk dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi, koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu PKL atau sebaliknya serta antar PKL itu sendiri, dengan kesadaran sama-sama menjadi bagian dari kepentingan bersama.

Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) paguyuban, terdiri dari:

1. Paguyuban PKL Kawasan Jendralan
2. Paguyuban PKL Jalan Sigaluh
3. Paguyuban PKL Jalan Daha
4. Paguyuban PKL Jalan Pemuda
5. Paguyuban PKL Jalan Jenggolo

Target jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi sebanyak 5 paguyuban sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 %, nilai capaian kinerja tersebut sama apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100 %.

Jumlah paguyuban PKL di Kota Magelang pada tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) paguyuban, yaitu:

1. Sigaluh (sudah tertata)
2. Lestari, terdiri dari PKL Jalan Majapahit dan Jalan Sriwijaya (belum tertata)
3. Armada Estate (sudah tertata)
4. Puri Boga Kencana
5. Sejuta Bunga, terdiri dari Jalan Sudirman dan Pasar Rejowinangun Lantai 2 (sudah tertata), Jalan Singosari dan Jalan Beringin (belum tertata)
6. Kartikasari (sudah tertata)
7. Jenggolo (sudah tertata)
8. Daha (sudah tertata)
9. Tuin Van Java (sudah tertata)
10. Jendralan (sudah tertata)
11. Badaan (sudah tertata)

Kelembagaan PKL dibentuk dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi, koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu PKL atau sebaliknya serta antar PKL itu sendiri, dengan kesadaran sama-sama menjadi bagian dari kepentingan bersama. Melalui kelembagaan ini setiap upaya dapat didukung bersama.

Upaya pembinaan terhadap organisasi PKL yang ada dilakukan dengan kegiatan:

- ~ Manajemen pengelolaan usaha PKL.
- ~ Pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
- ~ Sosialisasi proses penertiban izin lokasi berjualan bagi PKL.
- ~ Sosialisasi proses penertiban kartu identitas bagi PKL.
- ~ Pembinaan masalah hak dan kewajiban bagi PKL.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 73.407.410,00 dari anggaran sebesar Rp. 73.821.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 99,44% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya belimasyarakat dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Adanya regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	100%	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	100%	100%	100%	101%	101%	100%
3	Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin	5.414	4.501	5000	4501	90%	4598
		RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM	RTS-PM		
4	Tingkat kerawanan pangan dan gizi	10,34%	10,06%	Tidak ada	8,77%	8,77%	Tidak ada
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
	a. Ketersediaan energi (Kkal/kap/th)	90,02%	100%	95%	106,60%	112%	95%
	b. Ketersediaan protein (gr/kap/th)	100%	100%	100%	112,50%	112,50%	100%
7	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	78%	100%	83,50%	96%	114,97%	83,5%
8	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	100%	87%	100%	114,94%	87%
Rata-rata capaian kinerja						94,27%	

- b. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat ditandai dengan beberapa indikator, antara lain adanya regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, cakupan beras bersubsidi pada KK miskin, tingkat kerawanan pangan dan gizi, ketersediaan energi dan protein per kapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, stabilitas harga dan pasokan pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan.

Dalam rangka mewujudkan tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPMPKB sebesar Rp. 130.490.000,- yang terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar Rp. 7.950.000; Kegiatan Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan sebesar Rp. 8.790.000; Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah sebesar Rp. 13.836.000; Kegiatan Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan sebesar Rp. 7.031.000; Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan sebesar Rp. 18.000.000; Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian sebesar Rp. 12.020.000; Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah sebesar Rp. 11.315.000; Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan sebesar Rp. 20.985.000; Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan sebesar Rp. 16.588.000 dan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif sebesar Rp. 13.975.000.

Indikator Kinerja yang pertama adalah adanya regulasi ketahanan pangan. Ketahanan pangan berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka untuk mencapai kondisi tersebut, salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang adalah dengan menetapkan regulasi ketahanan pangan, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, sejak tahun 2010 telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang melalui Keputusan Walikota Magelang Nomor 521/32/02 tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Magelang (DKP) yang telah diperbaharui melalui Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2010. Tugas dari DKP ini adalah :

- 1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan Dewan Ketahanan Provinsi.
- 2) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah.

Adapun bidang tugas ketahanan pangan antara lain penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Keanggotaan DKP terdiri dari Walikota, BPMPKB, Bappeda, BPS, Dispartan, DKK, Diskoperindag, Disnakertransos, Dishub, Dinas Pendidikan, DPU, DPPKD, Badan Kesbangpolinmas, Badan Urusan Logistik Divisi Regional V Kedu, Bagian

Perekonomian, Bagian Kesra, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan dan Ketua TP PKK Kota Magelang yang dibantu oleh sekretariat DKP di BPMPKB.

Indikator Kinerja Utama yang kedua dari sasaran ini adalah ketersediaan pangan utama. Yang dimaksud pangan utama adalah kelompok pangan padi-padian khususnya jenis pangan beras giling. Untuk ketersediaan pangan utama tahun 2014 sebesar 12.451kg/kapita atau sudah mencapai 100%.

Bahwa untuk mengetahui situasi pangan dan gizi khususnya dari sisi konsumsi dan kebutuhan pangan di Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang melalui SKPD BPMPKB secara rutin setiap tahun melaksanakan analisa Konsumsi Pangan Masyarakat melalui pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melaksanakan survey analisa konsumsi pangan, menganalisa situasi konsumsi pangan dan menyusun proyeksi konsumsi dan kebutuhan pangan penduduk serta target penyediaan pangan Kota Magelang.

Pelaksanaan analisa konsumsi pangan melalui survey terhadap data konsumsi pangan rumah tangga yg diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kategori lain-lain. Berdasarkan analisa konsumsi pangan ini masing-masing kelompok pangan dapat diketahui tingkat ketersediaannya, dengan dasar perhitungannya masing-masing.

Untuk tingkat ketersediaan pangan utama didasarkan pada perhitungan konsumsi energy (kkal/kapita/hari) ditambah 10 % (perkiraan pertambahan kebutuhan) dikalikan jumlah penduduk tengah tahun 2014. Dimana untuk konsumsi energy jenis pangan beras giling sebesar 925,1 kkal/kapita/hari dan jumlah penduduk tengah tahun 2014 sebanyak 120.674 orang. Sehingga diperoleh angka ketersediaan pangan utama tahun 2014 sebesar 12.451 kg/kapita.

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah cakupan beras bersubsidi pada KK miskin. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 4.501 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 4.501 maka jumlah RTS-PM masih sama.

Indikator Kinerja Utama yang keempat adalah tingkat kerawanan pangan dan gizi. Untuk mengukur tingkat kerawanan pangan dan gizi dihitung berdasarkan data Peta Kerawanan Pangan, Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dimana kriteria dan indikator penyusunan peta tersebut disusun oleh kementerian dan sampai saat ini khusus untuk indikator dan kriteria “pemerintah kota” belum ada. Sehingga di Kota Magelang juga belum tersedia data untuk mengetahui tingkat kerawanan pangan dan gizi dimaksud. Dalam rangka mengetahui capaian indikator ini, digunakan data kemiskinan di Kota Magelang dengan asumsi bahwa keluarga sangat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara baik. Adapun prosentase jiwa sangat miskin di Kota Magelang sebesar 8,67%, sehingga tingkat kerawanan pangan dan gizi sebesar 8,67%.

Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah ketersediaan energi dan protein per kapita dengan dua indikator yaitu ketersediaan energi dan ketersediaan protein.

Ketersediaan energi dan ketersediaan protein dihitung kkal/kapita/th. Ketersediaan perkapita merupakan sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utamanya antara lain energi dan protein. Energi adalah sejumlah energi hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan, sedangkan protein adalah persenyawaan yang mengandung unsur "N" yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus.

Ketersediaan energi tahun 2014 sebesar 2345,2 kkal/kapita/th dari standar sebesar 2200 kkal/kapita/th atau sebesar 106,6%, apabila dibandingkan tahun 2013 sebesar 105% maka telah meningkat sebesar 6,6%.

Ketersediaan protein tahun 2014 sebesar 64,13 gr/kapita/th dari standar 57 gr/kapita/th atau sebesar 112,5%, apabila dibandingkan tahun 2013 sebesar 100% maka telah meningkat sebesar 12,5%.

Indikator Kinerja Utama yang keenam adalah ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan. Dalam rangka memenuhi informasi pasokan, harga dan akses pangan ini telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah. Kegiatan ini melaporkan informasi lengkap terkait hal tersebut setiap bulan, dan disusun laporan setiap akhir tahun sehingga informasi pasokan, harga dan akses pangan sangat tersedia/realisasi 100%.

Indikator Kinerja Utama yang ketujuh adalah stabilitas harga dan pasokan pangan. Untuk mengetahui stabilitas harga pangan di Kota Magelang telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah setiap bulan. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi harga di Kota Magelang stabil. Kemudian untuk mengetahui pasokan pangan di Kota Magelang dilaksanakan kegiatan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan dan dapat diketahui bahwa pasokan pangan di Kota Magelang berada pada posisi aman.

Meskipun tingkat ketersediaan pangan di Kota Magelang berada pada posisi aman, namun sebagian besar komoditas bahan pangan yang tersedia dan dikonsumsi masyarakat Kota Magelang berasal dari luar Kota Magelang, hal ini dikarenakan Kota Magelang bukanlah daerah sentra produksi bahan pangan.

Meskipun angka ketersediaan per kapita energi sudah melebihi target Indonesia Sehat 2010, namun perlu diwaspadai terkait distribusinyasehingga kerawanan pangan dan kekurangan gizi di suatu wilayah di Kota Magelang dapat dihindari.

Karena sebagian besar komoditas bahan pangan yang tersedia dan dikonsumsi masyarakat Kota Magelang berasal dari luar Kota Magelang, perlu diperhatikan tingkat ketersediaannya. Apabila dimungkinkan meskipun Kota Magelang dari sisi luas wilayah sangat terbatas diperlukan langkah untuk menciptakan sentra-sentra produksi pangan. Hal ini menjadi tugas dan perhatian dari Dewan Ketahanan Pangan daerah untuk selalu melaksanakan monitoring secara berkala. Demikian pula terkait dengan distribusi bahan pangan ke masyarakat Kota Magelang perlu terus dimonitor.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 18.607.700,00 dari anggaran sebesar Rp. 26.280.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 70,80% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 94,27%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ditandai dengan beberapa indikator, antara lain tingkat diversifikasi konsumsi pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman, tersedianya database produk pangan lokal dan skor pola pangan harapan.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPMP dan KB sebesar Rp. 23.630.000 yang terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan sebesar Rp. 15.000.000; dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman sebesar Rp. 8.630.000;

- b. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	ada	90%	93,70%	94,50%	100,85%	93,70%
2	Tersedianya database produk pangan lokal	100%	ada	ada	ada	100%	ada
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	5.414RTS-PM	93,6	93,50%	94,50%	101,07%	93,5%
Rata-rata Capaian Kinerja						100,64%	

Indikator Kinerja yang pertama adalah tersedianya diversifikasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Realisasi indikator ini sebesar 94,5%, artinya tingkat keragaman konsumsi pangan, kecukupan gizi, jenis makanan yang seimbang dan keamanan pangan di Kota Magelang sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 90%, maka telah mengalami peningkatan.

Indikator Kinerja Utama yang kedua dari sasaran ini adalah Tersedianya database produk pangan lokal. Dalam rangka menyediakan data terkait produk pangan lokal, telah disusun data per jenis pangan lokal yang ada di Kota Magelang di dalam kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternative.

Sehingga data ini telah tersedia untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan sumber pangan alternative.

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan hasil survey Konsumsi Pangan Rumah Tangga dan Analisis Konsumsi Pangan masyarakat melalui pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Magelang dapat disimpulkan bahwa secara umum konsumsi pangan masyarakat Kota Magelang, sudah menunjukkan adanya kecukupan konsumsi pangan yaitu secara kuantitas tingkat konsumsi energy penduduk Kota Magelang mencapai 2132,0 kkal/kap/hari atau 106,6% dari tingkat kecukupan energy sebesar 2000 kkal/kap/hari. Untuk konsumsi protein telah mencapai 58,3 gram/kap/hari atau 112% dari tingkat kecukupan protein 52,0 gram/kap/hari. Dari sisi kualitas diperoleh skor PPH sebesar 94,5 dari standar nasional 100.

Pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizibelum membudaya di sebagian masyarakat Kota Magelang. Dalam rangka membudayakan penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Magelang telah dilaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)

7. Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasaranadengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2013	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	200	200	250	250	100%	350
2	Persentase UMKMK yang produktif	60%	55%	60%	60%	100%	
Rata-rata Capaian Kinerja						100%	

- b. Sementara itu untuk Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan indikator jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana pada tahun 2014 mencapai realisasi sebesar 250 UKM dari target yang ditetapkan yaitu 250 UKM. Namun jika merujuk target yang ingin diraih di tahun 2015 yaitu sebesar 350 UKM maka kondisi ini masih sangat jauh dari harapan, untuk itu perlu akselerasi terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut. Demikian juga dengan indikator persentase UMKMK yang produktif yang di tahun 2014 mentargetkan 60 % berhasil mencapai realisasi 60 %, namun perolehan ini masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 100 %. Jumlah UMKM yang telah memanfaatkan teknologi dan sarana prasarananya masih sama dengan tahun lalu.

Permasalahan klasik dunia usaha antara lain rendahnya produktifitas, pangsa pasar, teknologi dan informasi, kualitas SDM dan kesulitan akses terhadap permodalan, menjadi point-point yang terus diupayakan oleh Pemerintah.

Upaya peningkatan produktifitas UMKM dilakukan melalui: 1) peningkatan kemampuan SDM untuk dapat menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai keinginan konsumen, termasuk pula kemasan (packing) maupun manajemen usaha; 2) Perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan teknologi informatika baik untuk sharing informasi, promosi/pemasaran hingga transaksi bisnis; 3) penggunaan sarana prasarana yang modern (memadai) sesuai dengan kebutuhan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.106.863.520,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.609.585.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 68,76% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi, dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Prosentase Koperasi Aktif	86%	86%	74%	93%	126%	75%
2	Jumlah koperasi	205	198	216	207	96%	
Rata-rata Capaian Kinerja						111%	

- b. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator persentase koperasi aktif telah melampaui target RPJMD 2011-2015. Persentase koperasi aktif telah mencapai 93%. Namun demikian jumlah keseluruhan koperasi di Kota Magelang tahun 2014 adalah sebanyak 207 koperasi, masih kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2014.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 186.905.900,00 dari anggaran sebesar Rp. 209.011.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 89,42% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

9. Terwujudnya perluasan pangsa pasar UMKMK

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perluasan pangsa pasar, dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Capaian Kinerja 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah promosi UMKMK	9	8	80%	13	7	54%	16
2	Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	13	8	50%	20	14	70%	24
3	Jumlah industri rumah tangga	---	729	41%	2000	1590	80%	2150
4	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	---	4,50%	100%	5%	5%	100%	5,5%
Rata-rata Capaian Kinerja							76%	

- b. Indikator jumlah promosi UMKMK dan jumlah kontak dagang dan temu usaha, keduanya memerlukan konsentrasi pembiayaan yang lebih terhadap kegiatan-kegiatan pendukungnya untuk mempercepat pencapaian target di tahun 2015. Indikator ini disuport dengan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan realisasi di tahun 2014 sebesar 7 kali promosi dan 14 kontak dagang masih jauh dari target yang ingin di capai di tahun 2015 yakni sebesar 16 kali promosi dan 24 kontak dagang. Untuk itu upaya peningkatan jumlah promosi baik melalui pameran maupun memanfaatkan teknologi informasi serta kontak kontak dagang potensial mulai diupayak di tahun 2015 maupun pada saatnya nanti tahun 2016.

Promosi UMKMK yang dilaksanakan yaitu mengikuti Pameran Inacraft di Jakarta (tingkat nasional) sedangkan untuk tingkat regional antara lain Pameran Jateng Fair di Semarang, Pameran Serayu Expo di Banjarnegara, Pameran Purworejo Expo di Purworejo, Pameran Festival Film Indonesia (FFI) di Semarang. Selain itu juga dilaksanakan pameran lokal berupa pasar murah dalam rangka hari jadi Kota Magelang dan menjelang Idul Fitri serta dalam rangka Car Free Day.

Kontak dagang dan temu usaha yang dilaksanakan meliputi keikutsertaan dalam Pasar Lelang Soropadan Expo yang terdiri dari Pasar Lelang Forward dan Pasar Lelang Spot sebanyak 7 kali dalam setahun.

Beberapa indikator yang tidak tercapai cenderung dikarenakan keterbatasan anggaran.

10. Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM dan daya saing usaha

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan jumlah UMKM dan daya saing usahadengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah UMKM, UKM non BPR/LKM UKM	2.785	2841	950	2886	304%	950
2	Jumlah UMKMK	---	2841	900	2886	321%	900
Rata-rata Capaian Kinerja						312,50%	

Untuk indikator Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM, usaha mikro dan kecil dan indikator jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit telah melampaui dan mudah mencapai target di dalam RPJMD 2011-2015. Jumlah yang mencapai 2886 unit jauh melebihi target tahun 2014 yang sebesar 900 unit, bahkan melebihi target 2015 sebesar 950 unit.

11. Terwujudnya peningkatan volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKMK

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKMK, dengan capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	390	508	380	797	209,74%	400

- b. Indikator jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit terus meningkat dari tahun ke tahun melampaui angka yang ditargetkan dan mudah mencapai target di dalam RPJMD 2011-2015. Jumlah yang mencapai 2886 unit jauh melebihi target tahun 2014 yang sebesar 380 unit, bahkan melebihi target 2015 sebesar 400 unit.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 27.669.300,00 dari anggaran sebesar Rp. 27.860.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 99,31 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 209,74%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

12. Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rasio petani terlatih						
	a. Pertanian	70%	76%	75%	90%	120%	80%
	b. Peternakan	75%	73%	70%	75%	107,14%	75%
	c. Perikanan	70%	75%	75%	90%	120%	80%
2	Cakupan bina kelompok petani	85%	100%	97%	100%	103,09%	97%
3	Cakupan bina kelompok peternak	85%	100%	98%	100%	102,04%	98%
Rata-rata Capaian Kinerja						110,45%	

Pada tahun 2014 secara kumulatif Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan telah memberdayakan sedikitnya 85% dari 630 petani diikutkan dalam program-program pelatihan baik di dinas maupun di provinsi. Dari program pelatihan tersebut diharapkan mampu menciptakan tenaga-tenaga petani daerah yang mandiri, profesional dan terlatih. Sehingga mampu mewujudkan

sasaran SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas. Sedangkan outcome sasaran tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan cakupan bina kelompok tani dan peternak dalam kurun waktu 2014 untuk 17 Kelurahan, telah memfasilitasi 49 kelompok tani diantaranya 21 kelompok tani Pertanian, 8 kelompok tani Peternakan dan 20 kelompok tani Perikanan. Artinya dari angka target 97% tahun 2014, telah tercapai 100% bina kelompok tani. Dan, angka target 98% tercapai 100% untuk bina kelompok peternak.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.243.429.200,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.350.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 92,05 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 110,45 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

13. Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	6	6	10	7	70%	11

Sementara untuk jumlah jenis bidang usaha agribisnis pada tahun 2014 telah terealisasi 7 (tujuh) bidang yang terdiri dari usaha pembesaran hortikultura tanaman anggrek, padi sistem tanam tumpangsari, ruminansia (kambing, sapi), unggas, sentra usaha pembesaran bibit ikan/udang galah, sentra pengolahan ikan pindang dan produksi telur asin belum mengalami penambahan. Namun, jenis-jenis usaha tersebut mampu meningkatkan pendapatan perkapita petani.

Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 70 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

14. Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah tempat pengolahan pasca panen:						
	a. Pertanian	3	3	4	4	100%	4
	b. Peternakan	1	1	2	2	100%	2
	c. Perikanan	3	3	3	3	100%	3
2	Jumlah sentra/pasar/Balai Benih		4	2	2	100%	

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
	budidaya Pertanian, Peternakan dan perikanan						
Rata-rata Capaian Kinerja						100%	

- b. Terlebih lagi dengan adanya jumlah tempat pengolahan pasca panen yang mengalami peningkatan, seperti pengolahan kripik jamur (Rejo Selatan), pengolahan bawang (Rejo Selatan) dan slondok (Magersari) menjadi nilai positif untuk pertumbuhan ekonomi secara umum di Kota Magelang. Khusus untuk tempat pengolahan pasca panen perikanan difokuskan pada teknis pengolahan dan pemasaran. Pada tahun 2014 terdapat beberapa tempat pengolahan pasca panen yang terdiri dari pertanian 4 (empat) tempat, peternakan 2 (dua) tempat dan perikanan terdapat 3 tempat.

Sementara untuk jumlah sentra / pasar / balai benih budidaya pertanian, peternakan dan perikanan terdapat 2 (dua) tempat dari revisi angka target 2 (dua) tempat pada tahun 2014. Sehingga hal menunjukkan terpenuhinya fasilitas budidaya untuk pertanian, peternakan dan perikanan.

Sebagaimana dengan adanya peningkatan kelembagaan petani yang semakin menguat, baik pertanian, peternakan dan perikanan. Sehingga kondisi sosial petani Kota Magelang relatif lebih berkembang, maju dan mandiri dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.632.008.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.544.389.944,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 70,05 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

15. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	5%	7%	100%	100%	100%	100%

- b. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis dan tersusunnya optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan menjadi sasaran utama dalam menyelenggarakan konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati, serta pemanfaatan lahan. Indikator kinerja *konservasi sumberdaya lahan dan hayati* masih berada pada angka 3% pada tahun 2011, 5% pada tahun 2012 dan, 7% pada tahun 2013 dan meningkat tajam pada tahun 2014 menjadi 100% yang bisa dilihat dalam pemanfaatan cukai demplot (contoh) tembakau di

Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Cacaban. Sedangkan pemanfaatan lahan telah terpenuhi 100% pada tahun 2014, dan dengan luasan lahan bengkok yang mencapai 27 ha masih difungsikan untuk sawah dan lahan.

16. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahansawah untuk agribisnis tanaman pangan,dengan capaian indikator kinerja sasaransebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- b. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis dan tersusunnya optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan menjadi sasaran utama dalam menyelenggarakan konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati, serta pemanfaatan lahan. Indikator kinerja konservasi sumberdaya lahan dan hayati masih berada pada angka 3% pada tahun 2011, 5% pada tahun 2012 dan, 7% pada tahun 2013 dan menignkat tajam pada tahun 2014 menjadi 100% yang bisa dilihat dalam pemanfaatan cukai demplot (contoh) tembakau di Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Cacaban. Sedangkan pemanfaatan lahan telah terpenuhi 100% pada tahun 2014, dan dengan luasan lahan bengkok yang mencapai 27 ha masih difungsikan untuk sawah dan lahan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 44.150.000,00 dari anggaran sebesarRp. 45.575.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 96,87 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar100,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

17. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)dengan capaian indikator kinerja sasaransebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	3,14%	2,73%	2,91%	1,90%	65%	2,91%

- b. Meskipununtuk kontribusi sektor perkebunan tidak menunjukkan tingkat perkembangan agregat produksi dan pendapatan dalam kurun waktu 2013, namun pada sektor pertanian telah menunjukkan kontribusi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (penghitungan oleh BPS) yang sangatsignifikan, yaitu

ditunjukkan pada persentase angka capaian kinerja 2,72% tahun 2013 dari angka target 2,91%, dan pada tahun 2014 mencapai 90%.

18. Terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitatif dan kualitas, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar:	60,21 Kw/Ha	58,01 Kw/Ha	57	59,32	104,07%	57
	Produksi padi/bahan pangan utama	3.372,57	2.885 ton	3.200	3.133	97,91%	3200
	Prod. Jagung	---	---	14,5	0,9	6,21%	14,5
	Prod. Ketela Pohon	14 ton	158,24 ton	144	28	19,44%	144
2	Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	1.500 pot	5.600 pot	9.000	9.400	104,44%	9000
3	Jumlah produksi peternakan						
	Daging (kg)	3.157.749	7.763.073	3.928.227	2.989.146	76,09%	4004635
	Telur (kg)	1.175.312	779.947	371.824	371.824	100%	379042
	Susu (l)	6.308,25	90.890	437.192	141.172	32,29%	445672
4	Produksi perikanan kelompok petani	118,23 ton	142,32 ton	277	153,32	55,35%	335
5	Jumlah konsumsi ikan	2.204	23 ton	17.73/16320	1701,35	96%	-
6	Jumlah konsumsi produk peternakan						
	daging (kg/Kap/th)	24,51	50,83	15,68	22,65	144,45%	15,68
	telor (kg/Kap/th)	9,1	5,91	2,97	5,98	201,35%	2,97
	susu (lt/Kap/th)	0,48	0,69	2,44	1,07	43,85%	2,44
7	Jumlah produksi peternakan kelompok ternak :						
	Sapi			55	53	96,36%	55
	Domba			13	70	538,46%	13
	unggas			1820	3838	210,88%	1820
Rata-rata Capaian Kinerja						120,45%	

- b. Sementara untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada tahun 2013 mencapai 58,01 kw/ha dari angka target 59,22 kw/ha. dan tahun 2014 mencapai 59, 32 kw/ha dari angka revisi target 57 kw/ha. Produktivitas padi / bahan

pangan utama lokal lainnya dalam kurun waktu 2013 dapat diproduksi sebanyak 2.885 ton dari target 3.358,93 ton.

Sementara pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 3.133 ton dari angka revisi target 3.200 ton. Kedua indikator tersebut mengalami penurunan capaian dikarenakan memang telah terjadi pengurangan luas lahan.

Untuk produksi jagung selama tahun 2014 dapat diproduksi sebanyak 0,9 ton dari revisi angka target 14,5 ton, Namun pada produksi ketela pohon mengalami peningkatan pesat mencapai 158,24 ton dari angka target 141 ton pada tahun 2013. dimana pada tahun sebelumnya hanya pada kisaran jumlah 21 ton saja. Sementara tahun 2014 terjadi realisasi produksi ketela pohon sebanyak 28 ton dari angka revisi target 144 ton. Penurunan hasil produksi ketela pohon tersebut secara tidak langsung terkait dengan dampak pengurangan luas lahan.

Pemerintah Kota Magelang juga telah mengadakan program kegiatan fasilitasi kerjasama yaitu dengan mempertemukan para pelaku usaha tanaman hortikultura khususnya retailment bunga anggrek sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi pengembangan usaha tanaman hias. Dan, diharapkan mampu meningkatkan pemasaran tani pada sektor tanaman hortikultura. Program kerja ini dapat dilihat pada kawasan Grand House Taman Kyai Langgeng yang memvisualisasikan pembesaran budidaya tanaman anggrek dengan luasan lahan 450 m². Dan, karena keterlambatan anggaran masuk dari perubahan APBD sehingga untuk produksi tanaman hias dan anggrek baru mencapai 1500 pot bunga dari angka target 7000 pot bunga pada tahun 2012, dan tahun 2013 meningkat menjadi 5600 pot dari angka target 7000 pot. Dan terdapat peningkatan produksi pada tahun 2014 menjadi 9400 pot dari angka target 9000 pot.

Sementara produksi peternakan kelompok ternak pada tahun 2014 mencapai 53 ekor untuk sapi, 70 ekor untuk domba dan 3.838 untuk populasi unggas di Kota Magelang. Indikator tersebut sebagai tolokukur keberhasilan Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok peternak yang mencapai angka 100% pada tahun 2014.

Dalam rangka meningkatkan mutu data peternakan dan sesuai akan kebutuhan data yang cepat, tepat dan akurat dari tahun-tahun maka Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kota Magelang selalu melakukan kerjasama secara terpadu dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Data Dan Informasi Dirjennak serta Pusat Data Dan Informasi Pertanian (PUSDATIN). Sehingga mulai tahun 2011 sampai tahun 2014 telah menghasilkan data parameter produksi ternak dengan metode penghitungan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang disebut sebagai e-Formnak. Dan metode penghitungan hasil ternak tersebut membuat perbedaan yang sangat signifikan antara target dan realisasi untuk jumlah produksi daging, telur dan susu, sehingga belum bisa ditentukan mencapai target atau tidaknya. Namun pada prinsipnya hal tersebut semakin menambah keakuratan data dalam menjalankan program kegiatan tersebut.

Sebagai contoh tabel penghitungan e-Formnak yang mengkonversikan daging karkas ke daging murni sebesar 75% adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Parameter Produksi Daging

No	Jenis Bahan	Berat		3+4(kg)	% dari karkas		Konversi Karkas ke Daging(%)
		Karkas(kg)	Edible Oval(kg)		Edible Oval(%)	Lemak(%)	
1	Sapi Potong	171,00	79,52	250,52	47	3	75
2	Sapi Perah	186,00	86,49	272,49	47	3	75
3	Kerbau	204,00	102,00	306,00	50	3	70
4	Kambing	16,00	0,60	16,60	4	3	68
5	Domba	15,00	0,56	15,56	4	3	68

Sumber : Dirjennak, Deptan

t

Sebagaimana diketahui hasil capaian kinerja peternakan tahun 2014 yang lebih akurat. Dan hasil capaian kinerja menyebutkan, untuk produksi daging mencapai 2.989.146 kg, telur 371.824 kg dan susu mencapai 141.172 liter.

Sementara produksi peternakan kelompok ternak pada tahun 2014 mencapai 53 ekor untuk sapi, 70 ekor untuk domba dan 3.838 untuk populasi unggas di Kota Magelang. Indikator tersebut sebagai tolokukur keberhasilan Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok peternak yang mencapai angka 100% pada tahun 2014.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.678.362.375,00 dari anggaran sebesar Rp. 708.840.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 95,70% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 120,45%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

19. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	7.840	8.627	7.121	14.283	200,58%	7582
2	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan lalulintas ternak	16 kali	12 kali	12	12	100%	12 kali/tahun
Rata-rata Capaian Kinerja						150,29%	

- b. Sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet direalisasikan melalui indikator kinerja jumlah ternak yang diperiksa kesehatannya. Tahun 2011 ternak yang diperiksa 6.340 ekor, dan tahun 2012 bertambah menjadi 7.840 ekor, dan pada tahun 2013 mencapai 8.627 ekor dari angka target 6.659 ekor. Demikian juga pada tahun 2014, jumlah ternak yang diperiksa kesehatannya mencapai 14.283 ekor. Peningkatan hasil kinerja tersebut karena didukung juga oleh program kegiatan seperti penyuluhan, vaksinasi dan penyemprotan desinfektan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kasmavet dapat berjalan dengan baik. Pemeriksaan hewan ternak dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH), Klinik Hewan, hewan kurban dan dilakukan secara berkesinambungan setidaknya 12 kali dalam setahun. Sementara untuk pemeriksaan sampel hasil produksi ternak setidaknya dilakukan pada jenis sampel hasil produksi ternak dilakukakan sebanyak 12 kali pemeriksaan. Sama halnya dengan pemeriksaan dan pengawasan lalulintas ternak telah dilakukan sebanyak 12 kali dari angka target 12 kali selama kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2014.

Peningkatan hasil kinerja didukung oleh kegiatan penyuluhan, vaksinasi dan penyemprotan desinfektan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pemeriksaan hewan ternak dan pengawasan lalu lintas ternak dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dilakukan setidaknya 12 kali dalam setahun.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 428.408.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 440.300.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 97,30 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 150,29%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

20. Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Penguatan kelembagaan petani						
	a. Pertanian	18 kelompok	19 kelompok	16	21	131,25%	16
	b. Peternakan	4 kelompok	6 kelompok	8	8	100%	10

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
	c. Perikanan	20 kelompok	24 kelompok	17	20	117,65%	17
Rata-rata Capaian Kinerja						116,30%	

- b. Kelembagaan petani dibentuk dalam rangka me-manage agar segala hal yang menyangkut permasalahan, pembinaan, kebutuhan, kemampuan dan lain sebagainya dapat dikoordinasikan dengan baik. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 127.778.850,00 dari anggaran sebesar Rp. 132.682.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 96,30% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 116,30 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

21. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah penggunaan benih padi bermutu	6.000	12.174 kg	5.500	5.750	104,55%	6000

- b. Dalam upaya meningkatkan pemahaman kelompok tani tentang penerapan teknologi tepat guna dan penemuan baru untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) maka dengan stok pupuk 120 ton dan realisasi 110 ton dapat mengalokasikan penggunaan benih padi bermutu 5000 kg pada tahun 2011 meningkat menjadi 6000 kg pada tahun 2012 dan capaian 12.174 kg pada tahun 2013 dari angka target 5500 kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 5750 kg. Sehingga intensifikasi pertanian dengan penggunaan varietas unggul baru dapat terwujud dalam urusan pertanian Pemerintah Kota Magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 819.729.825,00 dari anggaran sebesar Rp. 865.976.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 94,66% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,55%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

22. Terwujudnya penurunan serangan OPT

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya penurunan serangan OPT, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- b. Untuk penanggulangan serangan hama atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di wilayah 3 kecamatan telah dapat diatasi pada tahun 2013 dengan capaian angka realisasi indikator kinerja 100%, demikian halnya pada tahun 2014 mencapai angka persentase yang sama yaitu, 100%. Hal tersebut dikarenakan pihak pemerintah Kota Magelang mampu melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga dan mampu menerapkan sistem teknologi pertanian berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam bidang pertanian.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 7.499.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 99,99% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

23. Tersedianya benih/bibit berkualitas

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya benih/bibit berkualitas, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah populasi ternak:						
	Unggas	199.187ekor	286.371 ekor	73.217	322.182	440,04%	76401
	Domba / kambing	553 ekor	959 ekor	577	770	133,45%	603
	Sapi	247 ekor	280 ekor	212	272	128,30%	222
2	Jumlah bibit :						
	Sapi	60 ekor	37ekor	103	59	57,28%	103
	Kelinci	514 ekor	347 ekor	64	277	432,81%	64
Rata-rata Capaian Kinerja						238,38%	

- b. Dengan menerapkan teknologi untuk pengembangan pertanian pada tahun 2013 pemerintah Kota Magelang berhasil meningkatkan jumlah populasi ternak unggas dan sapi. Untuk unggas mengalami peningkatan populasi sebanyak 286.371 dari angka target 66851 ekor pada tahun 2012, pada tahun 2013 mencapai 286.371 dari angka target 70.034, dan tahun 2014 322.182 ekor. Sapi mencapai 280 ekor dari target pencapaian kinerja 203 ekor pada tahun 2013, dan 272 ekor pada tahun 2014. Adapun untuk jumlah populasi domba dan kambing tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 959 ekor dari angka target 522 ekor, dan meningkat lagi menjadi 770 ekor pada tahun 2014. Sehingga apa yang

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan jumlah populasi ternak yang dikarenakan kurang minatnya masyarakat untuk memelihara ternak dan secara temporary dan pada tahun tersebut mengalami penurunan harga jual ternak dibandingkan dengan harga pada tahun-tahun sebelumnya, mampu diatasi oleh Pemerintah Kota Magelang dalam mencari solusi yang cepat dan tepat.

Jumlah bibit sapi pada tahun 2013 mencapai 37 ekor dari target 37 ekor, dan angka capaian 59 ekor pada tahun 2014 karena jumlah petani sapi telah meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara untuk bibit kelinci tahun 2013 mengalami penurunan dari angka target 564 ekor dan capaian pada angka 347 ekor. Sementara pada tahun 2014 tercapai jumlah bibit kelinci sebanyak 277 ekor dari angka target 64 ekor. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya jumlah peternak kelinci meskipun jenis hewan tersebut juga sangat mudah untuk dikembangkan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 252.452.900,00 dari anggaran sebesar Rp. 257.300.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 98,11 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 238,38%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

24. Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani)	5 paket	5 paket	5	5	100%	5

- b. Melalui penggunaan teknologi tepat guna juga mengalami peningkatan pada jumlah paket Panca Usaha Tani. Dari 4 paket pada tahun 2010 menjadi 5 paket pada tahun 2011. Dan pada tahun 2012 juga mencakup 5 paket sampai dengan 2013. Sama halnya pada tahun 2014 terdiri dari 5 paket Panca Usaha Tani, antara lain ; penggunaan benih unggul, pengolahan sawah, pengendalian hama penyakit terpadu, pemupukan berimbang dan pengairan.

Sehingga pada tahun 2014 peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan dapat terwujud sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah Kota Magelang yang terstruktur dan terukur.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 212.160.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 218.203.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 97,23% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

25. Terwujudnya perlindungan hutan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perlindungan hutan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20 ha	23 ha	23	2	8,7%	25
2	Konservasi kawasan hutan	71 ha	71 ha	71	69	97,18%	71
3	Kerusakan kawasan hutan	1 ha	0 ha	2	0	100,00%	0
Rata-rata Capaian Kinerja						68,63%	

- b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta konservasi kawasan hutan yang telah dikonversi sebagai penghijauan lingkungan selama tahun 2013 berjalan seimbang dengan pemberian bibit-bibit tanaman yang diperlukan. Dengan melakukan kerjasama secara terpadu dengan instansi terkait, yaitu Kantor Lingkungan Hidup maka sasaran program peningkatan perlindungan hutan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam capaian angka target dan realisasinya. Dimana indikator kinerja rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2011 sebesar 20 hektar, pada tahun 2012 sebesar 20 hektar, dan pada tahun 2013 mencapai 23 hektar. Sementara tahun 2014 hanya 2 hektar, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil mengkonversi penghijauan lingkungan. Indikator kinerja konservasi kawasan hutan pada tahun 2011 sebesar 71 hektar, pada tahun 2012 sebesar 71 hektar, pada tahun 2013 juga 71 hektar dan tahun 2014 seluas 69 hektar. Sementara indikator kinerja kerusakan kawasan hutan pada tahun 2011 sebesar 2 hektar, tahun 2012 sebesar 1 hektar, dan pada tahun 2013 tidak terjadi kerusakan. Sama halnya pada tahun 2014 tidak terjadi kerusakan hutan dengan ditunjukkannya capaian angka 0 untuk indikator kerusakan kawasan hutan. Terlebih lagi dengan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi telah tercapai angka 84% dari revisi angka target 83%. Sehingga apa yang menjadi misi pemerintah kota magelang dalam merealisasikan program kinerja melalui sasaran perlindungan hutan telah berhasil. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 606.341.300,00 dari anggaran sebesar Rp. 645.132.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 93,98% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 68,63%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Misi keempat : Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian

1. Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya kelengkapan rencana tata ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	50%	25%	50%	100%	180%	70%
2	Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	50%	100%	80%	100%	125%	100%
3	Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Luas Permukiman yang tertata	75%	78%	80%	80%	100%	80%
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	---	15%	0%	0%	100%	0%
6	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	---	20.50%	45%	35%	78%	45%
7	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	3,2	3.94%	3,80%	3,80%	100%	-
8	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
9	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	100%	Ada
10	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	75%	97%	75%	98,36%	133%	75%
11	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	---	Ada	ada	ada	100%	Ada
12	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	40%	100%	90%	90%	1//%

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
13	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	---	Ada	ada	ada	100%	Ada
14	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	---	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	---	16%	16%	17%	106%	16%
17	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	50%	55%	59%	59%	100%	-
18	Ruang publik yang berubah peruntukannya	---	15%	0%	0%	100%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja						104,65%	

- b. Indikator tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010–2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010-2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) dapat tercapai. Namun sampai dengan tahun 2014 masih terdapat dokumen terkait tata ruang yang belum selesai tersusun. Dokumen yang sudah ada antara lain dokumen RTRW Kota Magelang, Perda RTRW, dokumen RDTRK, dan RTH. Dokumen RDTRK sampai pada tahun 2014 masih dalam proses pembahasan Perda. Demikian juga dengan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) juga belum tersedia. Belum ada rencana rinci yang ditetapkan menjadi peraturan daerah, meskipun naskah akademik sudah ada. Hal ini terkait dengan dinamika perubahan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi terkait proses legalisasi raperda RDTR, dan waktu yang dibutuhkan sangat panjang karena proses yang rumit. Selain itu terkait kelengkapan data spasial materi peta RDTR yang harus memenuhi syarat Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada saat proses penyusunan RTRW telah dilaksanakan konsultasi yang merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk participatory planning, yang memenuhi syarat inklusi dan mampu menjangk aspirasi masyarakat. RPJMD Kota Magelang menargetkan pada tahun 2015 konsultasi publik dapat terlaksana dan sampai tahun 2014 telah tercapai 100%.

Sarana informasi tata ruang wilayah Kota Magelang sudah cukup lengkap. BAPPEDA Kota Magelang sebagai leading sector dalam masalah RTRW telah melakukan program dan kegiatan terkait dengan penyediaan sarana informasi pemanfaatan ruang di Kota Magelang kepada masyarakat. Informasi tata ruang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang.

Saat ini telah tersedia informasi berupa peta analog yang merupakan bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Demikian juga dengan informasi berupa peta digital yang merupakan bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses juga telah ada.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta untuk kemudian dapat dijadikan dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang. Adapun jenis ijin pemanfaatan ruang adalah : ijin prinsip, ijin lokasi, ijin penggunaan pemanfaatan tanah, ijin mendirikan bangunan dan ijin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2014 pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW secara keseluruhan dapat terlayani.

Ijin lokasi sebagai implementasi Perda RTRW juga sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kota Magelang. Pada tahun 2014, seluruh ijin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2014 telah sesuai dengan tata ruang. Kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan capaian indikator ini. BAPPEDA (selaku sekretaris BKPRD), BP2T (instansi pemberi ijin), dan kantor pertanahan (terkait izin IPPT) yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi dan alih fungsi lahan masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal tata ruang dengan baik.

Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang seringkali terjadi di berbagai daerah. Pelanggaran dibidang penataan ruang adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Untuk itu perlu adanya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang. Tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari. Indikator ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran dibidang penataan ruang. Pelayanan pengaduan pelanggaran dibidang penataan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu pengaduan yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika hasil pengaduan terbukti benar telah terjadi pelanggaran, maka dilakukan penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran tersebut. Selama tahun 2014 tidak terjadi pelanggaran tata ruang di wilayah Kota Magelang.

Prosentase terbesar dalam penataan ruang Kota Magelang adalah wilayah permukiman. Hal ini dapat dipahami mengingat wilayah Kota Magelang adalah wilayah perkotaan dengan densitas penduduk yang tinggi. Permukiman di Kota Magelang umumnya berupa kawasan tempat tinggal atau hunian perkotaan. Wilayah administratif Kota Magelang memiliki luas sebesar 18,12 km² dengan areal permukiman seluas 1.312 Ha. Secara kualitatif, pada tahun 2014 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru secara kualitatif telah mencapai 80 %. Penataan permukiman dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan penataan sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan dan utilitas lainnya.

Sedangkan ruang publik mendapatkan proporsi luasan yang lebih kecil dalam penataan ruang. Oleh karena itu, perlu diatur secara ketat pengendalian fungsinya. Perubahan peruntukan ruang publik dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur konsistensi pelaksanaan Perda Tata Ruang. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pengendalian tata ruang dimana setiap perijinan pemanfaatan ruang harus betul-betul sesuai dengan RTRW sehingga perubahan peruntukan ruang, khususnya ruang publik dapat direduksi. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada ruang publik yang beralih fungsi selama tahun 2014.

Salah satu komponen dari ruang publik adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20 % dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota. Namun dalam hal ini, RPJMD Kota Magelang mempunyai target untuk indikator ini 25% pada tahun 2015. Pemerintah Kota Magelang menargetkan pada tahun 2015 dapat menyediakan luasan RTH sebesar 25% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sampai pada tahun 2014, realisasi di Kota Magelang baru mencapai 17%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator ketersediaan RTH Kota Magelang belum memenuhi target. Faktanya menambah RTH menjadi persoalan sulit yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang karena keterbatasan lahan. Perlu strategi yang lebih kreatif dalam menambah luasan RTH, salah satunya dengan melirik potensi RTH privat. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kota hijau. Dengan tepenuhinya RTH sebesar 30 persen di perkotaan harapannya akan terwujud ruang publik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Diperlukan dukungan dari masyarakat bersama Pemerintah Daerah untuk bersama-sama melaksanakan dan menyediakan RTH privat.

Hal ini juga sebagai bentuk kontrol terhadap kota agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2014 penataan taman-taman kota dalam rangka melaksanakan program Magelang Kota Sejuta Bunga pemerintah Kota Magelang juga menambah luasan RTH publik di beberapa lokasi yang masih memungkinkan.

Salah satu upaya untuk mengendalikan fungsi tata ruang antara lain dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Magelang dihitung berdasarkan jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan secara keseluruhan di Kota Magelang. Target RPJMD pada tahun 2015 adalah sebesar 50% dari jumlah bangunan keseluruhan di Kota Magelang harus sudah ber-IMB. Pada tahun 2014, rasio bangunan ber-IMB di Kota Magelang mencapai 35% dari target yang diharapkan yaitu sebesar 45%. Rendahnya kesadaran

masyarakat sebagai pemilik bangunan menjadi faktor utama. Dalam permasalahan ini, Pemerintah Kota Magelang terus berupaya mensosialisasikan IMB untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun demikian dalam hal pelayanan IMB kepada masyarakat, pada tahun 2014 seluruh permohonan IMB yang memenuhi syarat dapat terlayani.

Indikator lain yang berkaitan dengan penataan ruang adalah berkurangnya permukiman kumuh. Namun indikator ini belum didukung dengan data yang akurat terkait luas permukiman kumuh di Kota Magelang, oleh karena itu indikator kinerja ini pengukurannya masih bersifat kualitatif. Data terakhir terkait data permukiman kumuh adalah data PPLS Tahun 2011 yang sampai saat ini belum ada pengkinian data. SPM dari Kementerian PU menargetkan berkurangnya luasan permukiman kumuh pada tahun 2014 sebesar 10%. Dilain pihak kebijakan MDGs yang ditindaklanjuti dalam program nasional 100-0-100, yaitu 100% rumah bersanitasi, 0% permukiman kumuh, 100% pelayanan air bersih. Sehingga meskipun capaian indikator kinerja ini pada tahun 2014 mencapai 100% namun belum mampu menjawab tuntutan target nasional maupun global. Kantong-kantong permukiman kumuh di Kota Magelang antara lain berada di wilayah Kelurahan Rejowinangun Selatan, Rejowinangun Utara, Kedungsari dan Cacaban. Pemerintah Kota Magelang sangat mendukung dan memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang saat ini belum mencapai kondisi optimal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi.

Kementerian PU juga mengamanatkan indikator SPM tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota. Indikator kinerja ini telah tercapai dengan diterbitkannya Standardisasi/Analisa harga satuan bangunan di Kota Magelang. Namun menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, harga satuan yang ditetapkan dinilai masih terlalu tinggi. Untuk itu, instansi terkait perlu melakukan survey harga-harga material bangunan setiap 3 (tiga) bulanan dan dinformasikan kepada masyarakat melalui penerbitan standarisasi pedoman harga material bangunan triwulan, agar diperoleh harga pasar yang tepat dan terupdate.

Berkaitan dengan jasa konstruksi, maka perlu diatur pemberian ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK. Ijin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menerapkan standar pelayanan pengurusan IUJK maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Realisasi indikator kinerja ini dapat tercapai sesuai yang ditetapkan dalam SPM Kementerian Pekerjaan Umum. Keberhasilan Capaian indikator ini ditunjang dengan koordinasi yang baik antara instansi terkait yaitu BP2T, DKPT dan DPU.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki sistem informasi jasa konstruksi seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi indikator kinerja ini dapat tercapai, karena didukung oleh sistem informasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat secara online Adapun sistem informasi jasa konstruksi yang ada di Kota Magelang sebanyak 7

(tujuh) buah yaitu, 2 (dua) software digunakan di DPU dan 5 (lima) aplikasi digunakan di SKPD yang lain (BP2T dan LPSE).

- 1) Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
 - a) Perencanaan yang tidak terintegrasi, sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota.
 - b) Konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada juga lemah dan masih lemahnya kepastian hukum (intensif dan disinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan.
 - c) Pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang.
 - d) Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan densitas penduduk yang cukup tinggi menyebabkan desakan akan kebutuhan ruang tinggal.
 - e) Terbatasnya lahan kosong untuk menambah Prasarana, Sarana dan Utilitas lainnya di wilayah perkotaan.
 - f) Kompleksitas yang cukup tinggi dalam penataan permukiman kumuh.
 - g) Penanganan permukiman kumuh adalah program pemerintah tingkat nasional (topdown). Pemerintah kota hanya sebagai pelaksana, ataupun jauh menanggapi prakarsa pemerintah nasional sehingga keberlangsungan program tidak terjadi.
 - h) Kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya masih kurang.
 - i) Minimnya PPNS dibidang penataan ruang.
 - j) Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang belum disahkan.

- 2) Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a) Pembinaan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penataan ruang kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memberikan arahan-arahan dan alternatif-alternatif solusi teknis secara profesional berkaitan dengan ragam permasalahan penataan ruang yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
 - b) Pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat (Ditjen Penataan Ruang) untuk membantu dan turut menyusun rencana tata ruang, maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - c) Kerjasama pendanaan dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan namun telah memiliki sumber daya manusia yang cukup di bidang penataan ruang sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari Pemerintah Pusat hanyalah bantuan bagi kerja sama pendanaan.
 - d) Penyusunan oleh pemerintah pusat adalah penyiapan dana dan tenaga ahli oleh Pemerintah Pusat dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dari Pemerintah Daerah, serta pelibatan aktif dari

berbagai stakeholders terkait lainnya.

Dengan adanya upaya-upaya di atas diharapkan Dinamika pembangunan yang terjadi baik yang didorong oleh kondisi di dalam wilayah Indonesia (fisik, sosial dan ekonomi) maupun akibat pengaruh eksternal (globalisasi, demokratisasi, good governance, dan lain lain) telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi penataan ruang di Indonesia. Kondisi ini harus disikapi dengan perlunya perubahan cara pandang dan cara tindak karena tanpa itu penyelesaian yang dilakukan hanya akan bersifat simptomatik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menetapkan kerangka pengembangan strategis (strategic development framework) sebagai upaya terpadu untuk mengantisipasi/menjawab tantangan yang terjadi. Penataan ruang merupakan instrumen untuk merumuskan tujuan dan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai landasan pengembangan kebijakan pembangunan sektoral dan daerah, termasuk sebagai landasan pengembangan infrastruktur yang efisien sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk dapat mewujudkan kerangka pembangunan strategis tersebut perlu dipersiapkan langkah-langkah perbaikan terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang, antara lain :

- 1) Mendorong proses penyusunan RTRW yang tidak hanya bersifat top-down akan tetapi juga diimbangi dengan proses bottom-up sehingga tercipta sinergi antar kepentingan pusat dan daerah, maupun antara kepentingan pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan.
- 2) Melaksanakan proses penyusunan rencana tata ruang yang bersifat dinamis dan fokus kepada hal-hal yang strategis (strategic planning) serta mempertimbangkan keragaman budaya lokal.
- 3) Mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah maupun kota.
- 4) Melanjutkan penyiapan NSPM penyusunan rencana tata ruang (RTR) dan pemanfaatan ruang dan melakukan diseminasi, sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan penataan ruang kepada seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat).
- 5) Meningkatkan penegakan hukum dengan memasukkan aspek sanksi di dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Meningkatkan kapasitas perencana baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan sistem informasi penataan ruang sebagai alat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi profesi dan LSM.

2. Terwujudnya Peningkatan kualitas Prasarana/infrastruktur Perkotaan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan peningkatankualitas prasarana/infrastruktur perkotaan,dengan capaian indikator kinerja sasaransebagaimana tersaji dalam tabel sebagaiberikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik	83%	85%	85%	89,09%	94%	90%
2	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	92%	99.20%	99,20%	99,20%	100%	99%
3	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	92%	68.86%	68,86%	218,36%	317%	69%
4	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	92%	60.36%	60,36%	60,36%	100%	60%
5	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	92%	93.51%	80%	93,51%	117%	80%
6	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	92%	93.51%	70%	64,83%	93%	70%
7	Data base jalan yang ter update	ada	80%	ada	ada	100%	ada
8	Rasio kawasan khusus PKL per seluruh kawasan PKL	8%		20%	20%	100%	20%
9	Proporsi Jumlah Jembatan dengan Kondisi baik	90%	91%	91,00%	91,80%	101%	91%
10	Proporsi panjang prasarana pejalan kaki dengan kondisi baik	75%	76%	80%	76,16%	95%	80%
11	Rasio Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik	55%	58%	58%	60%	103%	58%
12	Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik	65%	67%	67%	75%	112%	67%
13	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	80%	84%	83%	84%	101,20%	92%
14	Panjang jalan dilalui roda 4	92%	92%	92%	92%	100%	92%
15	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	92%	92%	92%	92%	100%	35%
16	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	25%	30%	35%	31%	89%	35%
17	Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	10%	8%	8%	8%	100%	8%
18	Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	---	90%	100%	100%	100%	90%
19	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	---	0%	70%	70%	100%	70%
20	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	---	80%	80%	85%	106%	80%

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
21	Rasio Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	---	75%	85%	88,90%	105%	85%
22	Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	3	90%	90%	90%	100%	100%
23	Terbangunnya Pasar Rejowinangun	30%	100%	80%	80%	100%	80%
24	Tersedianya Peraturan Daerah bidang bangunan gedung (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria)	ada	ada	ada	ada	100%	ada
25	Tersedianya data bangunan dan gedung beserta lingkungannya di Kota Magelang yang ter-update	belum ada	ada	ada	ada	100%	ada
Rata-rata Capaian Kinerja						105,33%	

- b. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang mencapai angka 89,09 % dalam keadaan baik. Kondisi ini di dukung adanya pendanaan dari DAU, DAK dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tanah yang relatif stabil juga menjadi faktor pendukung. Sehingga untuk menjaga agar kondisi jalan tetap dalam kondisi baik hanya dilakukan kegiatan pemeliharaan-pemeliharaan ringan secara rutin dan berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan di Kota Magelang yang masih menimbulkan permasalahan. Misalnya Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang sering dalam keadaan rusak, bergelombang dan macet, akibat dilalui truk yang bermuatan pasir dengan frekwensi yang cukup padat. Selain itu kecepatan yang lambat dari pengangkutan pasir serta jalan yang menyempit di Jalan Urip Sumoharjo. Kondisi ini menyebabkan kecepatan yang direncanakan di jalan arteri primer tidak dapat terpenuhi. Meskipun jalan arteri primer tersebut dalam kewenangan pemerintah provinsi dan pusat, namun kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang.

Rencana kebutuhan pembangunan jalan baru belum terinformasikan secara jelas, karena belum ditetapkannya peraturan daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan belum tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang dialokasikan di kawasan pengembangan kegiatan-kegiatan baru. Kunci dari pusat-pusat kegiatan baru adalah terbentuknya pola jalan baru dan pembangunannya. Selain itu, infra struktur berupa aset jalan baru untuk kawasan pengembangan kegiatan baru berupa pembangunan perumahan, secara formal belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Magelang, sehingga jalan lingkungan tersebut belum tercatat dalam daftar jalan kota dan akibatnya instansi terkait belum dapat secara rutin /berkala memelihara jalannya. Untuk mengantisipasi penyerahan infrastruktur dari hasil pembangunan lingkungan permukiman/perumahan baru, perlu diselenggarakan identifikasi infra struktur baik yang sudah maupun yang akan dibangun.

Mengingat Kota Magelang luas wilayahnya hanya 18,12 km², dan akses ke jalan arteri primer, kolektor, dan jalan-jalan lingkungan telah terhubung maka masyarakat

sangat mudah untuk melakukan perjalanan ke pusat-pusat kegiatan yang dituju. Dengan demikian indikator jalan agar sesuai dengan SPM urusan Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum khususnya jalan telah terpenuhi. Pemerintah Kota Magelang hanya memerlukan langkah-langkah yang bersifat perawatan dan pemeliharaan secara rutin/berkala agar kondisi jalan tetap baik.

Untuk menunjang kegiatan pengelolaan jaringan jalan, maka perlu database jalan yang dapat digunakan pada proses perencanaan, implementasi, monitoring dan pengendalian. Data base harus terus menerus di update untuk mendukung informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Magelang telah memiliki data base jalan yang ter update.

Permasalahan pengelolaan jalan tidak terlepas dari kegiatan sektor informal berupa kawasan untuk pedagang Kaki Lima (PKL). Pada Tahun 2014, PKL di Kota Magelang telah direlokasi di kawasan khusus PKL agar tidak mengganggu kegiatan fungsi utama, fasilitas umum dan lalu lintas jalan. Pengaturan dan pengendalian persebaran PKL pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan jenis dagangan, waktu dagangan, bentuk tempat berdagang dan PKL yang berada di sekitar koridor jalan utama yaitu jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder diarahkan hanya pada satu sisi jalan. Penataan kawasan peruntukan PKL ditata dengan konsep aglomerasi dan estetika sehingga mendukung konsep pariwisata perkotaan. Kawasan khusus PKL di Kota Magelang dipusatkan di 4 titik yaitu : Kuliner Twin van Java di alun-alun, Kuliner Sejuta Bunga di Shopping Center, Puri Boga Kencana di Kebonpolo serta Kartika Sari di Lapangan Abu bakrin.

Jembatan juga merupakan salah satu prasarana utama sektor pehubungan yang mempunyai peranan dalam mendukung terwujudnya sarana pembangunan terutama dalam menghubungkan jalan yang dilalui masyarakat dalam beraktivitas. Data Jembatan di Kota Magelang berjumlah 83 jembatan yang 75 atau sekitar 91,8 % diantaranya dalam kondisi yang baik.

Demikian juga dengan jalur khusus pejalan kaki merupakan salah satu prasarana yang mempunyai peranan tersendiri. Pengembangan jalur pejalan kaki diantaranya dengan meningkatkan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dan penyebrangan zebra. Kedepan perlu mendapatkan pertimbangan untuk pembuatan zona selamat sekolah, penyebrangan pelican, dan/atau penyebrangan underpass. Pelaksanaan pengembangan jalur pejalan kaki harus sesuai standar keselamatan pengguna jalan, dan diarahkan di seluruh jalan arteri, kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder serta penyediaan dan peningkatan pohon peneduh/pelindung. Pada tahun 2014, ditargetkan trotoar yang terbangun dengan kondisi baik sebesar 85 %, namun hanya 76 % yang terealisasi. Hal ini disebabkan pembangunan jalan tembus Jl. Sarwo Edhie Wibowo - Jl. Jend, Sudirman yang ditunda karena belum *clear* nya masalah sertifikat tanah yang digunakan.

Trotoar berfungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya agar tidak terganggu atau terpengaruh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan

untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya juga dapat sebagai drainase/saluran pembuangan. Secara umum jalan-jalan protokol yang ada di Kota Magelang telah memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) hanya beberapa ruas jalan di beberapa lokasi yang belum dilengkapi dengan sistem drainase. Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) secara kualitatif sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak tercapai karena ditundanya pembangunan jalan tembus sebagaimana disebutkan diatas.

Permasalahan yang sering muncul di berbagai tempat adalah sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar. Pada tahun 2014 di Kota Magelang sudah dilakukan penataan, sehingga tampak lebih rapi dan tertata. Rasio Sempadan jalan yang masih dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar di Kota Magelang mengalami penurunan dan pada tahun 2014 secara kualitatif tersisa sebesar 8%.

Sarana dan prasarana perkotaan yang cukup penting adalah jaringan irigasi. Perlu dilakukan survey untuk melihat kondisi sekaligus menghitung kebutuhan saluran irigasi di masa yang akan datang mengingat dalam Perda RTRW konversi lahan persawahan selama 20 tahun mendatang menjadi permukiman yang diijinkan sebesar 100 Ha, maka akan terjadi perubahan fungsi dari saluran irigasi menjadi fungsi yang lain. Oleh karena itu perlu diidentifikasi lahan persawahan yang mana yang kemungkinan akan terjadi konversi menjadi permukiman. Selain itu yang perlu diperhatikan debit air yang mengalir di saluran irigasi, apabila terjadi penurunan debit, maka area persawahan yang semakin kecil mendapatkan debit air irigasi itulah yang direkomendasikan untuk konversi lahan menjadi permukiman. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dengan kondisi baik terealisasi 58% di tahun 2014.

Air irigasi teknis untuk lahan pertanian masih dapat dicukupi melalui Saluran Irigasi teknis Kali Bening dan kali Manggis. Namun yang perlu dicermati bila terjadi konversi lahan persawahan menjadi permukiman, maka air irigasi yang tersedia tidak dapat lagi dimanfaatkan lagi oleh kegiatan pertanian. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan kegiatan perikanan agar sumber air yang ada dapat dimanfaatkan.

Indikator kinerja ini merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Luas areal sawah di Kota Magelang yang merupakan sawah dengan pengairan teknis seluas 211,7336 ha atau 11,68% dari luas Kota Magelang. Pada Tahun 2014 lahan pertanian yang dapat tercover sistem irigasi kali manggis dan kali bening sebesar 84%sedangkan sisanya belum dapat terlayani dengan sistem irigasi dan menggunakan pengairan non irigasi.

Pengembangan prasarana drainase bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan sistem drainase di seluruh wilayah daerah yang meliputi saluran drainase primer, saluran drainase sekunder dan saluran drainase tersier. Pengembangan prasarana drainase dilaksanakan sesuai dengan rencana induk drainase lingkungan daerah. Panjang eksisting saluran drainase utama dengan kondisi baik di Kota Magelang pada tahun 2014 sebesar 75%.

Sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU adalah jenis sanitary landfill. Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 100 %. Indikator ini tercapai karena dianggap TPSA Banyuurip sudah sanitary landfill, namun faktanya masih bertipe controlling landfill. Maka sebenarnya capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0 %. Dalam hal ini terdapat kesalahan dalam penyusunan indikator dalam RPJMD Tahun 2011-2015. Umur pakai TPSA Banyuurip (di Kabupaten Magelang) dengan luas 7,8 hektar tersebut sebenarnya diperkirakan masih bisa digunakan hingga 2 tahun kedepan, namun karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang di lokasi tersebut akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau, maka harus segera dilakukan pemindahan lokasi TPSA.

SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase. Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sangat banyak jenisnya diantaranya yang sudah dimiliki oleh Kota Magelang adalah komposter yang tersebar di beberapa kelurahan, selain itu di lokasi TPSA juga memproduksi pupuk kompos sebagai salah satu upaya mereduksi volume sampah. Fasilitas pengurangan sampah juga dapat berupa sistem misalnya sistem pengelolaan sampah 3R. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kota Magelang secara kualitatif sebesar 70% dari total kebutuhan.

Sistem pengelolaan sampah di perkotaan menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dari sub-sub sistem pengelolaan sampah tersebut, secara kualitatif 85% telah dilaksanakan di Kota Magelang. Bahkan terdapat kegiatan pengelolaan sampah 3R yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat di setiap kelurahan melalui kampung organik. Kampung organik menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan karena aktivitasnya juga memberikan andil dalam pengelolaan sampah.

Sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan berikutnya adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU dapat diartikan sebagai lampu penerangan yang dipasang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum/bersama/bersifat publik. PJU yang dimaksud adalah lampu-lampu dipasang pada ruas-ruas jalan yang dianggap perlu untuk diberikan penerangan, PJU juga dapat dipasang pada tempat umum lain seperti taman kota. Di tahun 2014 indikator rasio ketersediaan penerangan jalan umum telah tercapai.

Pasar tradisional juga merupakan infrastruktur perkotaan yang harus dipenuhi. Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Magelang sebanyak 4 (empat) pasar, yaitu Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, Pasar Kebonpolo, Pasar Cacaban seluruhnya telah berada dalam kondisi 90 % baik Dengan dibangunnya Pasar Rejowinangun pada Tahun 2012, maka indikator rasio pasar tradisional dalam kondisi baik pada tahun 2014 dapat dicapai.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari insfastruktur perkotaan. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung. Bangunan gedung di Kota Magelang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Kegiatan pendataan bangunan dan gedung dimaksudkan untuk tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. Data yang diperlukan meliputi data umum, data status/riwayat dan gambar legger bangunan gedung. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Magelang telah memiliki data bangunan dan gedung yang ter-update.

- c. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Jumlah kendaraan yang semakin meningkat, sehingga kecepatan rencana dalam suatu ruas jalan tidak dapat dipenuhi.
 - 2) Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
 - 3) Masih adanya area pemukiman penduduk yang jauh dari TPS dan sulit terjangkau kendaraan pengangkut sampah yang disebabkan kontur daerah yang naik turun.
 - 4) Umur pakai TPSA Banyuurip tersisa 1-2 tahun lagi.
 - 5) Hampir seluruh sistem drainase perkotaan menggunakan sistem campuran.
 - 6) Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 7) Kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah yang masih kurang diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- d. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- 1) Perlunya pengaturan pola lalu lintas terutama di ruas-ruas jalan yang padat pada jam sibuk.
 - 2) Adanya kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan kampung organik dan 3R perlu terus didorong untuk mereduksi masalah sampah perkotaan.
 - 3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting karena berdasarkan draft SPM, pada tahun 2015, pemisahan sampah harus dilakukan paling tidak untuk sampah kering dan basah pada tatanan sumber. Selain itu juga diperlukan upaya pengurangan sampah dari sumber baik melalui proses 3R maupun composting rumah tangga.
 - 4) Perlunya sistem pembuangan limbah domestik yang terpisah dengan drainase.
 - 5) Perlunya pembinaan jasa konstruksi secara berkala untuk menjaga mutu pekerjaan penyedia jasa konstruksi yang ada di Kota Magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 405.521.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 446.015.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 90,92 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,33 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur perumahan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengembangan infrastruktur perumahan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2013	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rasio jumlah rumah layak huni	92%	83%	83%	92%	110,42%	85%
2	Tersedianya rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan rumah susun sederhana	---	ada	1	ada	100%	1

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2013	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
	milik (RUSUNAMI)						
3	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	300L/d	94.32%	94%	94%	100%	94%
4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	80%	84%	83%	84%	101,2%	83%
5	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	81%	89.28%	89,28%	89,28%	100%	89%
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92%	92.00%	92,50%	92,50%	100%	92,5%
7	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	92%	58.72%	59%	59%	100%	59%
8	Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	86%	89.01%	89%	89%	100%	89%
9	Rumah tangga pengguna air bersih	90%	98.97%	95%	95,62%	101%	97%
10	Rumah tangga pengguna listrik	100%	---	97%	97,00%	100%	97%
11	Rumah tangga bersanitasi	86%	96.74%	97%	93,09%	96%	90%
12	Rumah tangga yang telah memiliki rumah tempat tinggal layak huni	92%	92%	92%	89,51%	97%	70%
Rata-rata Capaian Kinerja						100,50%	

- b. Indikator Kinerja Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Indikator ini tidak termasuk dalam SPM dari Kementerian Pekerjaan Umum, namun kondisi ini perlu didukung dengan pendataan bersama dengan SKPD terkait, agar pengatasan permasalahannya dapat diselesaikan secara bertahap dan terpadu, khususnya untuk wilayah permukiman yang padat hunian, dan kumuh. Khusus untuk kawasan kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan tanah. Peran pemerintah sangat strategis untuk untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan septic tank comunal dalam dokumen SSK yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan untuk menyukseskan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi.

Indikator kinerja rasio rumah layak huni. Rumah layak huni secara nasional SPMnya dari Kementerian Perumahan Rakyat 100% dengan kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak layak Huni (RTLH) antara SKPD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni.

Indikator kinerja rasio lingkungan permukiman kumuh. Permasalahan untuk menentukan rasio lingkungan permukiman kumuh yang dihadapi yaitu belum

adanya Surat Keputusan Walikota tentang lingkungan permukiman kumuh, yang diawali dengan penelitian / kajian penentuan kriteria lingkungan permukiman kumuh dan melaksanakan survey. Setelah tahap tersebut diselesaikan maka kegiatan, waktu melaksanakan, dan biaya yang diperlukan dapat diperkirakan secara jelas.

Indikator kinerja berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Indikator ini belum didukung dengan adanya data luas permukiman kumuh di kota Magelang, oleh karena itu indikator kinerja ini pengukurannya masih perkiraan. SPM dari Kantor Kementerian PU target tahun 2014 berkurangnya luasan permukiman kumuh sebesar 10%. Sedangkan kebijakan MDGs yang ditindaklanjuti dalam program nasional 100-0-100, 100% rumah bersanitasi, 0% permukiman kumuh, 100% pelayanan air bersih.

Indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni. Indikator ini memerlukan data jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah keseluruhan rumah di suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni terlebih dahulu ditetapkan kriteria rumah layak huni, setelah itu baru dilakukan survey yang melibatkan SKPD terkait, seperti DKPTK, DPU, Bappeda, Kantor Statistik, Kantor Litbang dan Statistik, BPMPKB.

Indikator kinerja cakupan rumah layak huni terjangkau. Indikator diperoleh dari ; a) indeks keterjangkauan yang dihasilkan dari pembagian data berupa median harga rumah, dan data median penghasilan rumah tangga, b) cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang diperoleh dari pembagian dari data jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah layak huni dalam jangka waktu tertentu dibagi data jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%.

Target SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan kurun waktu 2009 – 2025 sebesar 70%, dengan melihat realisasi indikator kinerja di Kota Magelang di atas 90% , maka indikator kinerja cakupan rumah layak huni terjangkau telah tercapai. Namun yang menjadi permasalahan data-data pendukung untuk proses perhitungan indikator kinerja tersebut belum difasilitasi, sehingga indikator kinerja yang dicantumkan masih bersifat asumsi.

Indikator kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana dan Utilitas Umum (PSU). Indikator ini diperoleh dari jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%, oleh karena itu dalam proses perhitungan indikator kinerja ini diperlukan data jumlah yang lingkungan yang didukung kelengkapan PSU (jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik).

Indikator kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Permukiman. Indikator ini belum dapat disusun, karena tahapnya baru disosialisasikan oleh Kementerian PU kepada Pemerintah Provinsi, kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Magelang

perlu segera menindaklanjuti, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hak rakyat untuk menempati rumah layak huni.

Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28H Amandemen UUD 1945, menyatakan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyediaan rumah layak huni di Kota Magelang umumnya disediakan oleh developer swasta yang berorientasi bisnis sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkau harga jual rumah. Pemerintah semakin mengupayakan agar pengembang merealisasikan hunian berimbang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Upaya tersebut disosialisasikan melalui pemberian insentif berupa keringanan pajak dan retribusi, pemberian bantuan teknis dan fasilitas serta kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan rumah susun sederhana.

Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana permukiman terutama di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi antara lain melalui program PNPM mandiri bidang perumahan permukiman dan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sehingga pada tahun 2013 luasan permukiman kumuh di lingkungan Kota Magelang berkurang

SPM Rumah layak huni secara nasional dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan target capaian 100% dalam kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara SKPD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni. Data rumah layak huni/rumah bersanitasi dan permukiman kumuh di Kota Magelang menggunakan data PPLS Tahun 2011 sehingga perlu dilakukan survey yang melibatkan instansi terkait, seperti DKPTK, DPU, Bappeda, BPS, Kantor Litbang dan Statistik dan BPMPKB untuk mendapatkan data yang terkini. Pada tahun 2014 secara kualitatif rasio rumah layak huni di Kota Magelang sudah sangat baik mencapai angka 92 %.

Rumah tangga bersanitasi menjadi standar minimal rumah layak huni. Untuk kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan lahan. Peran pemerintah sangat strategis dalam menyelesaikan masalah ini melalui penyediaan jamban dan septic tank komunal. Secara strategis, Pemerintah telah munculkan perencanaan sanitasi di Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam buku putih sanitasi dan dokumen Strategi Sanitasi Kota. Partisipasi dan swadaya masyarakat sangat menentukan dalam mensukseskan program-program pengentasan permasalahan sanitasi.

Rumah tinggal yang berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi meliputi fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan limbah dan sarana pembuangan sampah. Tingkat

kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal bersanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar) sudah mulai membaik.

Permasalahan utama untuk menentukan rasio lingkungan permukiman kumuh adalah belum adanya Surat Keputusan Walikota tentang penetapan lingkungan permukiman kumuh di Kota Magelang. Penetapan lingkungan kumuh tentunya diawali dengan penelitian / kajian penentuan kriteria lingkungan permukiman kumuh dan melaksanakan survey. Hasilnya akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi persoalan lingkungan kumuh.

Lingkungan sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang baik pula. Indikator ini diperoleh dari jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam proses perhitungan indikator kinerja ini diperlukan data jumlah yang lingkungan yang didukung kelengkapan PSU (jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik). Angka yang tersaji saat ini hanya menggambarkan secara kualitatif untuk mengetahui luasan lingkungan yang telah dilengkapi PSU.

Salah satu indikator dibidang perumahan adalah tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik). Indikator ini belum dapat tercapai, karena sampai tahun 2014 baru mencapai tahap sosialisasi oleh Kementerian PU kepada Pemerintah Provinsi, kabupaten/Kota.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maka pada tahun 2013 telah dibangun Rusunawa di Kelurahan Potrobangsari. Tahapan selanjutnya telah dipersiapkan petunjuk teknis terkait pemanfaatan dan pengelolaan Rusunawa tersebut agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Magelang.

Salah satu kebutuhan untuk menunjang kehidupan masyarakat adalah tersedianya sarana air bersih. Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Magelang yang menggunakan jasa layanan air bersih PDAM Kota Magelang sebesar 90%. Adapun rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM umumnya menggunakan air bersih PDAM secara bersama-sama dengan pelanggan PDAM yang lokasi rumahnya saling berdekatan atau memanfaatkan air tanah dengan sumur gali. Penyediaan air baku yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang dicukupi oleh beberapa sumber mata air baik yang ada di Kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang, antara lain Tuk Pecah, Kalimas I dan II, Kanoman I dan II, Wulung dan Mata Air Kalegen dengan debit yang bervariasi

Ketersediaan air bersih untuk masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari di Kota Magelang secara kuantitas telah dapat terpenuhi. Namun yang perlu diperhatikan adalah disisi kualitas. Kualitas air bersih yang digunakan oleh masyarakat perlu selalu dipantau secara rutin/berkala khususnya untuk masyarakat yang tidak berlangganan PDAM. Ketersediaan akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari menjadi kewenangan PDAM. PDAM selaku stakeholder telah memenuhi indikator kinerja tersebut karena telah dapat melampaui target yang ditetapkan MDGs yaitu sebesar 68,87% masyarakat yang mengakses air bersih/air minum. Namun pelayanan air bersih di Kota Magelang masih terkendala tingkat kebocoran pipa yang cukup tinggi.

Sementara itu, ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada masih dapat dicukupi melalui Saluran Irigasi teknis Kali Bening dan Kali Manggis. Hal ini mengingat lahan pertanian di Kota Magelang relatif kecil. Namun yang perlu dicermati justru apabila terjadi konversi lahan persawahan menjadi permukiman, maka air irigasi yang tersedia tidak dapat lagi dimanfaatkan lagi oleh kegiatan pertanian. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan mengalihkan peruntukan air irigasi menjadi kegiatan budidaya perikanan agar sumber air yang ada dapat dimanfaatkan.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, masyarakat di Kota Magelang masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN. Indikator yang digunakan Kementerian ESDM dan PLN untuk menentukan jumlah rumah tangga pengguna listrik adalah dengan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi di Kota Magelang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional yaitu berada dikisaran angka 90%. Hal ini karena wilayah Kota Magelang merupakan wilayah perkotaan yang relatif mudah menjangkau sumber pasokan listrik PLN dan daya beli listrik yang cukup tinggi. Hanya sebagian kecil di wilayah pinggiran (grassroot) Kota Magelang yang belum teraliri listrik PLN. Umumnya rumah yang belum teraliri listrik PLN menyambung dengan rumah terdekat yang sudah teraliri listrik.

- c. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
- 1) Masih adanya rumah tinggal belum bersanitasi.
 - 2) Tuntutan untuk mencapai target MDGs tahun 2015 dan Key Performance Indicators akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan akses sanitasi layak 100% di akhir RPJMN 2015-2019 belum mendekati angka yang diharapkan.
 - 3) Masih adanya lingkungan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang.
 - 4) Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di kota menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni.
 - 5) Pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat belum dilaksanakan secara simultan.
 - 6) Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
 - 7) Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.
 - 8) Belum tersusunnya NSPK Permukiman/perumahan di Kota Magelang.

d. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi pemukiman kumuh maka pembangunan Rusunawa dan Rusunami perlu diteruskan dengan sasaran di daerah padat penduduk dan kumuh
- 2) Perlu pengaturan mekanisme pemanfaatan rusunawa yang telah ada dan yang akan dibangun sebagai pedoman pelaksanaan dan operasional untuk menjamin kepastian dan kejelasan pelayanan.
- 3) Monitoring secara berkala pada fasilitas-fasilitas umum dan sanitasi lingkungan, serta upaya menanamkan pola hidup bersih dan sehat.
- 4) Penguatan koordinasi lintas sektoral dalam upaya penyediaan infrastruktur perumahan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 405.521.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 446.015.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 90,92 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,50 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Prosentase
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	7.962,427.000	5.964.543.559	74.90%
Program pengelolaan areal pemakaman	363.792.000	355.546.550	97.73%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,146,741,000	1,082,976,250	94.43%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	97.000.000	85.647.500	88.30%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.267.304.000	9.128.478.210	88.90%
Total	19.837.264.000	16.617.192.069	83,77%

b. Capaian kinerja indikator sasaran :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	---	15%	20,00%	17,23%	86%	20%
2	Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kawalon-alon)	---	80%	90%	90,00%	100,00%	100%
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	---	37%	37%	27,00%	72,97%	37%
4	Sempadan sungai yang	---	50%	15%	15,00%	100,00%	15%

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
	dipakai bangunan liar						
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	100%	65%	100,00%	153,85%	75%
6	Penegakan hukum lingkungan hidup	100%	Tidak ada	1	100,00%	100,00%	100%
7	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	92%	3,83%	5%	4,78%	95,60%	ada
8	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	100%	tidak ada	ada	ada	100%	ada
9	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	---	tidak ada	ada	ada	100%	ada
10	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
11	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	---	tidak ada	100%	100%	100,00%	100%
12	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
13	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	tidak ada pengaduan	90%	100,00%	111,11%	90%
14	Cakupan kunjungan/ patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS	---	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
15	Rasio ketersediaan IPAL	30%	77%	27%	78,00%	288,89%	27%
16	Jumlah penduduk terlayani jaringan persampahan menjadi sebesar 128.820 jiwa (96%), kondisi eksisting 120.849 jiwa	---		91%	95,00%	104,40%	91%
17	Rasio penanganan sampah perkotaan (pengangkutan)	---	85%	85%	95,00%	111,76%	85%
18	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	---	2	5	1	20,00%	5
Rata-rata Capaian Kinerja						108,04%	

c. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Realisasi sampai dengan 2014 adalah 17,23 %. Target di tahun 2015 adalah 20 % sesuai RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031. Bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, maka terjadi kenaikan rasio karena pada tahun 2014 dilakukan penanaman pohon-pohon di sepanjang trotoar pada di Kota Magelang.

Penghitungan capaian kinerja indikator dengan cara :

$$= \frac{\text{luas RTH saat ini}}{\text{luas Kota Magelang}} \times 100 \% = \frac{3,12 \text{ km}^2}{18,12 \text{ km}^2} \times 100 \% = 17,23 \%$$

Sementara untuk pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kawasan alon-alon) sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 80 %. Target di tahun 2015 adalah 100 %. Pada tahun 2014 ini tidak terdapat kegiatan pengembangan alon-alon sehingga target masih sama seperti tahun 2013. Pada tahun 2013 telah dibangun bunderan untuk videotron, sementara pada tahun 2012 dibangun trotoar di sekeliling alon-alon.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk sampai dengan tahun 2014 adalah 37 %. Ini berarti, apabila semua penduduk Kota Magelang meninggal, maka yang bisa dimakamkan di TPU hanya 37 %.

Penghitungan capaian kinerja indikator dengan cara :

$$= \frac{\text{luas makam}}{\text{luas kubur/orang (2mx1m)}} \times \text{jumlah penduduk}$$

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liarsampai dengan tahun 2014 adalah 15%. Target di tahun 2015 adalah 15%. Pencapaian target tersebut pada tahun 2014 didasarkan pada estimasi berdasarkan pengamatan visual. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan survey dan pemetaan untuk mengetahui luas sempadan sungai total dan pemetaan untuk mengetahui berapa luas bangunan liar yang menempati lahan sempadan sungai.

Berkaitan dengan pelaksanaan dokumen lingkungan khususnya AMDAL di Kota Magelang, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada akhir periode RPJM 2010-2015 sebesar 75 %. Di Kota Magelang hanya terdapat 3 kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yaitu Taman Kyai Langgeng, GOR Samapta dan Borobudur International Golf. Dari ketiga kegiatan tersebut, baru GOR Samapta dan Borobudur International Golf yang telah menyusun dokumen AMDAL dan telah dilakukan pengawasan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Sehingga pada tahun 2014, realisasi dari indikator ini adalah 100 %.

Dokumen SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) ini rutin disusun oleh KLH setiap tahun. Dokumen ini memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan : (1) Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya yang berisi mengenai sumber daya alam (lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, air, udara, laut dan pesisir, iklim) dan bencana alam. (2) Tekanan terhadap lingkungan yang berisi mengenai demografi, permukiman, kesehatan, pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, pariwisata dan limbah B3. (3) Upaya pengelolaan lingkungan yang berisi tentang rehabilitasi lingkungan, AMDAL, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan. Realisasi tahun 2014 adalah 100 %.

Penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Magelang baik yang bersifat nasional, regional maupun lokal telah secara bertahap dilakukan. Sehingga dapat dikatakan

indikator ini dapat dicapai.

Ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai Kota Magelang dengan melihat data realisasi pencapaian target indikator kinerja, belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini karena kurangnya kesadaran dari pelaku kegiatan penghasil limbah untuk membuat IPAL.

Demikian juga dengan Ketersediaan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota belum terealisasi di Kota Magelang karena ketergantungan yang sangat besar dari alokasi dana pemerintah pusat, maupun provinsi. Sedangkan kemampuan pemerintah kota Magelang untuk penyediaan lahan untuk sistem tersebut hanya dapat menggunakan aset tanah eks bengkok yang semakin berkurang.

Ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun telah tercapai. SPM Kementerian PU tahun 2014 menargetkan 50% dan dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) tahun 2015 ditargetkan 55%. Sedangkan genangan yang terjadi di Kota Magelang relatif kecil. Hal ini didukung kondisi geografis Kota Magelang. Dengan telah disusunnya dokumen Master Plan Drainase Kota, maka diharapkan kondisi drainase di Kota Magelang akan lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sampai dengan tahun 2014 adalah 100 %. Indikator ini adalah merupakan Standar Pelayanan Minimal yang selesai sampai dengan tahun 2013. Namun hingga saat ini SPM yang baru belum disusun dan akan disusun pada tahun 2015. Sehingga tahun 2014 hingga 2015 adalah tahun peralihan.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang akan dipantau dalam rangka pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan usaha tersebut terhadap badan air. Jumlah usaha yang diawasi pada tahun 2013 ada 8 kegiatan yaitu RSJ dr Soedjono, RSI, RS Harapan, RSB Panti Bahagia, RSUD Tidar, Kebon Tebu Resto, PT Probitas Jaya Utama dan Hotel Safari. Sementara jumlah usaha yang diawasi pada tahun 2014 ada 4 kegiatan (2 kegiatan hotel yaitu Hotel Puri Asri dan Hotel Atria serta 2 rumah sakit yaitu RSUD Tidar dan RS Harapan). Pada tahun 2013 hingga 2014 semua kegiatan tersebut menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan semuanya berhasil diawasi.

Sesuai SPM penghitungan capaian kinerja indikator ini dengan cara =

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	⇒	$\frac{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$
		$= 4/4 \times 100 \% = 100 \%$

Kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administratif (memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL) hingga tahun 2014 ini sebanyak 85 perusahaan. Dan sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan dari Kantor Lingkungan Hidup adalah apabila perusahaan telah memiliki IPAL (memenuhi syarat teknis pencegahan pencemaran air).

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada tahun 2014 di Kota Magelang adalah nihil. Persyaratan administratif adalah persyaratan terkait sistem perizinan antara lain izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara. Persyaratan teknis antara lain melakukan pengolahan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan, cerobong dilengkapi lubang sampling, lantai kerja, tangga, dan pagar pengaman limbah, serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/atau kegiatan.

Tidak adanya usaha yang diawasi pada tahun 2014 ini dikarenakan tidak terdapat industri di Kota Magelang yang berpotensi mencemari udara dan diwajibkan mempunyai dokumen lingkungan (UKL-UPL, DPLH atau AMDAL). Kriteria untuk dijadikan target SPM ini adalah untuk perusahaan yang diwajibkan mempunyai dokumen lingkungan dan cerobong yang memenuhi spesifikasi persyaratan SNI. Target SPM ini ditujukan untuk industri semen, pulp, kertas, PLTU, batubara, besi baja dan ketel uap.

Banyak usaha dan atau kegiatan di Kota Magelang yang sebenarnya memiliki potensi mencemari udara namun secara administrasi tidak diwajibkan memiliki dokumen lingkungan dan secara teknis belum memiliki upaya pencegahan pencemaran udara yang sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara, misalnya banyak yang sudah memiliki cerobong asap, namun tidak memenuhi syarat sesuai SNI 19-7117.1-2005 (Emisi Gas Buang-Sumber Tidak Bergerak). Sebagai contoh industri tahu. Industri tahu sangat mencemari kualitas udara sebagai hasil samping dari pembakaran arang yang merupakan bagian dari proses produksinya. Para pemilik usaha tahu sebenarnya sudah berinisiatif untuk membuat cerobong asap, namun kenyataannya tidak memenuhi syarat karena ketinggian cerobong hanya beberapa meter dan terbuat dari bambu. Ketinggian cerobong asap dan bahan pembuatannya harus disesuaikan dengan syarat SNI 19-7117.1-2005 (Emisi Gas Buang-Sumber Tidak Bergerak). Para pemilik usaha tahu merasa keberatan, mengingat usaha ini hanya *home industri* yang omsetnya kecil. Selain itu apabila akan dibuat cerobong asap komunal, perlu dicari lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembuatan cerobong asap dan dana investasi yang cukup besar. Sehingga solusi untuk mengurangi pencemaran udara dari kegiatan industri tahu bisa dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar lokasi usaha. Diharapkan dengan penanaman pohon, dapat menyerap polutan emisi gas CO₂ yang dihasilkan industri tahu.

Di Kota Magelang juga sudah ada kegiatan usaha yang menghasilkan polutan dan sudah memiliki cerobong asap, yaitu PT. Kencana Sari Jaya (industri kayu). Namun cerobong ini juga tidak sesuai dengan SNI dan kinerjanya belum maksimal, terbukti dengan adanya pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi usaha yang mengeluhkan adanya pencemaran udara dari usaha kayu ini pada tahun 2014. Setelah di tindaklanjuti oleh KLH, PT. Kencana Sari Jaya berniat untuk memperbaiki kinerja cerobong asapnya.

Sesuai SPM penghitungan capaian kinerja indikator ini dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara}}{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}} \times 100\%$$

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi

Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 adalah 100%. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Lahan untuk produksi biomassa adalah areal yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan). Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

Kota Magelang mempunyai luas wilayah 1812 hektar. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Magelang, terdapat rencana pemanfaatan lahan untuk produksi biomassa (lahan pertanian, tegal/kebun, hutan dan lainnya) seluas 50 hektar. Pada tahun 2014 belum dapat ditentukan prosentase luas lahan dan/atau tanah untuk biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya karena kegiatan penetapan luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan hutan dan lahan untuk produksi biomassa dilaksanakan pada tahun 2014.

Sementara pada tahun 2013, luasan lahan yang diperuntukkan untuk produksi biomassa seluas 326,7 hektar dan luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 326,7 hektar.

Sehingga sesuai SPM penghitungan capaian kinerja indikator ini dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Prosentase (\%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}}{\text{Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100\% \\ = 326,7/326,7 \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2014 prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah 100%. Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Sehingga setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada bupati/walikota atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Indikator ini adalah merupakan Standar Pelayanan Minimal yang selesai sampai dengan tahun 2013. Namun hingga saat ini SPM yang baru belum disusun dan akan disusun pada tahun 2015. Sehingga tahun 2014 hingga 2015 adalah tahun peralihan.

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dicapai dengan cara menentukan jumlah pengaduan yang dapat diatasi oleh KLH dari jumlah pengaduan masyarakat yang diterima KLH.

Jumlah pengaduan yang diterima oleh KLH pada tahun 2014 ini ada 5 pengaduan, yaitu 2 masalah tower BTS, masalah pencemaran udara oleh PT. Kencana Sari Jaya, masalah pembuangan limbah ke saluran drainase kota oleh Rumah Makan Tip-Top dan masalah pengaduan kepada pabrik ceriping di Griya Asri Tuguran yang membuang limbahnya ke saluran drainase). Dari kelima masalah tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti dan berhasil diselesaikan KLH.

Sesuai SPM penghitungan capaian kinerja indikator ini dilakukan dengan cara:

$$\begin{aligned} &\text{Prosentase (\%) jumlah} \\ &\text{pengaduan masyarakat} \\ &\text{akibat adanya dugaan} \\ &\text{pencemaran dan/atau} \\ &\text{perusakan lingkungan} \\ &\text{hidup yang ditindaklanjuti} \end{aligned} = \frac{\begin{aligned} &\text{jumlah pengaduan masyarakat} \\ &\text{akibat adanya dugaan pencemaran} \\ &\text{dan/atau perusakan lingkungan} \\ &\text{hidup yang ditindaklanjuti} \end{aligned}}{\begin{aligned} &\text{jumlah pengaduan yang diterima} \\ &\text{instansi lingkungan hidup dalam 1} \\ &\text{tahun} \end{aligned}} \times 100\% \\ &5/5 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Jumlah penduduk terlayani jaringan persampahan menjadi sebesar 128.820 jiwa (96%) sampai dengan tahun 2014 adalah 95 %. Pengukuran indikator tersebut dari tahun ketahun kurang tepat, seharusnya apabila yang disebutkan jumlah maka angka keluaran capaian indikator adalah jiwa bukan prosentase. Prosentase jumlah penduduk terlayani jaringan sampah dicapai dengan cara mengetahui jumlah penduduk yang terlayani jaringan sampah dari jumlah seluruh penduduk se-Kota Magelang. Apabila dengan prosentase jumlah penduduk terlayani jaringan sampah 95 %, sementara penduduk yang tidak terlayani yaitu sebesar 5 % mengelola sampah dengan cara dibakar atau ditimbun dalam tanah.

Penghitungan capaian kinerja indikator dengan cara:

$$\begin{aligned} &= \text{Prosentase penduduk terlayani jaringan sampah} \times \text{Jumlah penduduk Kota} \\ &\text{Magelang} \\ &= 95 \% \times 130.955 \text{ jiwa} = 124.407 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 cakupan kunjungan/patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS adalah sebesar 100 %. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kebersihan adalah dengan menambah fasilitas untuk pengelolaan sampah. Jumlah TPS dan Transfer Depo yang ada di Kota Magelang sebanyak 16 (enam belas) buah. Setiap harinya seluruh TPS dan Transfer Depo menerima pembuangan sampah yang dibawa oleh gerobak-gerobak pengangkut sampah sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian diangkut oleh dump truk untuk dibuang ke TPA. Sampah yang ada di TPS dan Transfer Depo seluruhnya dapat terangkut ke TPA oleh patroli truk sampah.

Rasio ketersediaan IPAL di Kota Magelang sampai dengan tahun 2014 adalah 78 %. rasio ketersediaan IPAL dicapai dengan cara menentukan jenis usaha yang sudah memiliki IPAL terhadap jumlah usaha yang ada di Kota Magelang yang wajib memiliki IPAL. Jumlah usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan tahun 2014 ini sebanyak 66 buah, dan belum semuanya memiliki IPAL (karena sebagai syarat direkomendasikan dokumen lingkungan suatu usaha adalah sudah dimilikinya IPAL).

Penghitungan capaian kinerja indikator ini dengan cara:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Jumlah usaha yang sudah memiliki IPAL}}{\text{Jumlah usaha yang wajib memiliki IPAL}} \times 100 \% = \frac{66}{85} \times 100 \% = 78 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah,

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yang digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Namun kenyataannya, di semua transfer depo yang ada di Kota Magelang tetap terdapat sampah. Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 11 buah.

Penghitungan capaian kinerja indikator Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Namun perhitungan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena daya tampung TPS maupun transfer depo yang ada saat ini dipaksakan harus dapat menampung semua timbulan sampah yang masuk ke TPS/transfer depo. Sehingga banyak ditemukan TPS/transfer depo yang sampahnya meluber hingga ke jalan.

Rasio penanganan sampah perkotaan (pengangkutan) sampai dengan tahun 2014 adalah 95 %. Volume sampah Kota Magelang = 300,33 m³/hari (Data Buku Laporan Volume Sampah, Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2013). Dengan rasio pengangkutan sampah perkotaan 95 %, maka jumlah yang terangkut hanya 285,3 m³/hari sementara sisanya 15,01 m³/hari (5 %) tercecer. Jadi sampah bisa diangkut tapi daya tampung depo/TPS yang terbatas, sehingga ada yang tercecer/luber di sekitar transfer depo dan TPS.

Penghitungan capaian kinerja indikator dengan cara :

$$= \frac{\text{volume sampah yang dapat diangkut/hari}}{\text{volume sampah total/hari}} \times 100 \% = \frac{285,3 \text{ m}^3}{300,33} \times 100 \% = 95 \%$$

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada tahun 2014 sebanyak 1 buah di Jurangombo Utara. TPST didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan penolakan sampah secara terpusat. Fungsi TPST adalah sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian/pembersihan, pengemasan dan pengiriman produk daur ulang sampah. Target di tahun 2015 adalah 2 buah. Saat ini warga (Pondok Dudan) di Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan mengusulkan untuk pengadaan TPST di wilayah tersebut.

- d. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
- 1) Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) di Kota Magelang karena keterbatasan lahan milik Pemkot untuk pengembangan RTH publik.
 - 2) Masih banyak pelanggaran di sempadan sungai dan rel kereta yang dijadikan ruang / lahan tertutup.
 - 3) Masih rendahnya pelayanan dan pengelolaan pemakaman.

- 4) Ketidapatuhan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mendirikan bangunan di atas sempadan sungai.
- 5) Terbatasnya lahan untuk merelokasi masyarakat yang tinggal diatas sempadan sungai.
- 6) Belum adanya kegiatan pemetaan luas sempadan sungai dan kegiatan pemetaan luas bangunan liar yang menempati lahan sempadan sungai.
- 7) Kurangnya ketersediaan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga hasil penyusunan SLHD dan basis data ini belum sepenuhnya menghasilkan informasi akurat, efektif dan efisien dalam kebijakan pengelolaan hidup.
- 8) Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan.
- 9) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan.
- 10) Penegakan hukum lingkungan baik dalam bentuk UU, Permen, Kepmen, Perda Provinsi, atau Perda Kota belum dapat dilakukan secara simultan/menyeluruh dari segi cakupan penerapannya.
- 11) Masih banyak penduduk yang membuang sampahnya langsung ke sungai.
- 12) Tingkat disiplin warga/tenaga pengangkut sampah di wilayah kelurahan yang tidak mentaati batas waktu/jam sehingga masih ada sampah yang menginap di TPS maupun transfer depo.
- 13) Kegiatan usaha sudah diawasi akan tetapi Pemerintah Kota belum dapat mengeluarkan sanksi administratif ataupun paksaan pemerintah.
- 14) Lemahnya kesadaran masyarakat (pemilik usaha) untuk melakukan pencegahan pencemaran air dengan menyediakan IPAL yang sesuai standar. Banyak industri kecil(seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari air tapi tidak memenuhi persyaratan administrasi (tidak diwajibkan menyusun dokumen lingkungan), sehingga tidak dijadikan target pengawasan.
- 15) Tidak semua perusahaan yang sudah menyusun dokumen UKL-UPL melaksanakan apa yang tertuang dalam dokumen, seperti pembuatan IPAL.
- 16) Terbatasnya lahan untuk lokasi pembuatan IPAL, khususnya industri tahu.
- 17) Biaya operasional dan pemeliharaan IPAL yang dianggap cukup mahal oleh perusahaan.
- 18) Belum adanya sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha apabila ternyata belum melaksanakan isi dari dokumen lingkungan yang telah disusun, terutama dalam pencegahan pencemaran air, karena merupakan kewenangan kepala daerah.
- 19) Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah belum dilakukan melalui keputusan walikota dan belum diinformasikan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman (baru dilaporkan dalam bentuk Buku Status Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Biomassa Kota Magelang).
- 20) Belum ada Standar Operational Procedure (SOP) KLH dalam menangani pengaduan dari masyarakat. Selama ini apabila ada pengaduan, akan dipilah dulu antara masalah perijinan dan masalah lingkungan. Untuk masalah perijinan akan diserahkan ke BP2T, sementara yang akan ditangani adalah masalah lingkungan.
- 21) Belum ada Perda yang mengatur masalah pengaduan lingkungan.

e. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Perlu terus dikembangkan inovasi/terobosan pemerintah daerah untuk mengembangkan RTH privat diantaranya melalui kampung organik maupun vertical garden.
- 2) Perlunya Ketersediaan data yang akurat dari instansi teknis sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 3) Perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang kapasitas kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang cukup tinggi terbukti dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Walikota mengenai Kapasitas Kelembagaan yang menyarankan agar Kantor Lingkungan Hidup diganti menjadi Badan Lingkungan Hidup. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan urusan lingkungan hidup di Kota Magelang menjadi lebih optimal.
- 4) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di TPSA, khususnya efisiensi dalam angkutan sampah, perlu dibangun Stasiun Peralihan Antara (SPA). Sampah kota yang masuk ke SPA akan dipadatkan kemudian dipindahkan ke truk besar untuk dibawa ke TPSA. Selain kegiatan pemadatan dan pemindahan sampah, di SPA juga dapat dilakukan pengolahan sampah 3R.
- 5) Perlu segera disusun Peraturan Perundang-Undangan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya nanti akan menjabarkan NSPK pengolahan dan pembuangan Air Limbah domestik dan Industri serta Bahan Berbahaya dan Beracun melalui Perwal.
- 6) Telah terbentuknya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan Paguyuban Pengelola Sampah merupakan modal yang sangat besar dalam pengelolaan sampah berbasis 3R dan Pemerintah Kota Magelang perlu terus mendampingi agar tetap eksis.

Arah pengembangan penanganan sampah perkotaan di Kota Magelang pada masing-masing tahap difokuskan kepada:

- 1) Pewardahan (*User Interfaces*), dengan sistem terpilah, untuk kawasan permukiman(rumah tangga) menggunakan bak sampah, sedang untuk perkotaan (Kawasan Komersial,Pasar, Kawasan Perkantoran, Fasilitas umum, Sapuan sampah jalan, dan Kawasan industri) menggunakan tong sampah terpilah, sedang kawasan rumah sakit menggunakan Bin sampah B3. Pada tahap pewardahan ini, diharapkan pada level rumah tangga sudah melakukan composting sampah untuk mengurangi produksi sampah baik melalui komposter rumah tangga (takakura) maupun komposter komunal. Selain itu pada tatanan produsen sampah, diharapkan proses 3R bisa berjalan.
- 2) Pengumpulan (RT/RW), untuk proses pengambilan sampah kawasan permukiman (rumah tangga) dengan grobak sampah/motor sampah/ mobil sampah kelurahan yang diangkut ke TPS terdekat.
- 3) Tempat penampungan sementara (TPS), terdiri dari Transfer depo, TPS, dan Kontainer.

- 4) Pengangkutan, dari Transfer depo/ TPS/ Kontainer ke TPA menggunakan Truck dan Dump truck yang dalam rangka efisiensi pengangkutan dapat dilakukan kompkasi terhadap sampah yang sudah ditampung di TPS.
- 5) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), Optimaliasi TPST, Tempat pemrosesan akhir (TPA), optimalisasi penggunaan TPA Banyu Urip dan Penyiapan pengembangan TPA Regional Magelang.

f. Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD, dalam UU No 32 tahun 2009 pengawasan dilakukan oleh PPLH yg merupakan pejabat fungsional ditetapkan melalui SK Walikota. Dalam rangka penegakan hukum maka Walikota melakukan pelimpahan wewenang kepada Kepala KLH untuk mengeluarkan sanksi administratif. KLH Kota Magelang belum memiliki kedua alat tersebut.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan usaha/industri terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya sehingga daya dukung. Hal ini karena kurangnya kontrol terhadap kegiatan usaha/industri dalam pelaksanaan dan pelaporan dokumen lingkungan sehingga menyebabkan kurangnya data primer dalam menetapkan status mutu air pada kegiatan industri.
- 3) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan belum tersusunnya Perwal/Perda tentang izin pengelolaan lingkungan hidup secara lengkap salah satunya adalah izin IPLC, yang baru dimiliki oleh Kota Magelang baru izin TPS dan pengumpulan limbah B3. Tahun ini KLH akan mengajukan raperda untuk menindaklanjuti UU NO 32 tahun 2009.
- 4) Perubahan regulasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat dan pengelolaan aset. Perubahan regulasi didasarkan Permendagri 32 tahun 2011 dan 39 tahun 2012 tentang HIBAH dan BANSOS yg bersumber dari APBD sehingga berpengaruh dalam pembangun IPAL untuk masyarakat/UKM.
- 5) Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan, dilihat dari:
 - a) Masih rendahnya pemilahan sampah rumah tangga, composting sampah dan kegiatan 3R di masyarakat;
 - b) Pelayanan penyapuan jalan di jalan utama belum mencapai 100%;
 - c) Karakteristik beberapa tempat penampungan sampah (baik berupa transfer depo dan TPS) yang belum mengakomodir penampungan sampah terpilah;
 - d) Belum adanya kegiatan komposting sampah di TPS;
 - e) Pengangkutan sampah yang belum terpilah (masih tercampur organik dan anorganik);
 - f) keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 16.617.192.069,00 dari anggaran sebesarRp. 19.837.264.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar83,77 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 108,04 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pengembangan infrastruktur kawasan strategis, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun	55%	60%	65%	65%	100,00%	75%

- b. Pengembangan infrastruktur di Kota Magelang ditujukan untuk mencapai visi sebagai kota jasa. Kota Magelang juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan dan pendidikan di Kota Magelang, yang mempunyai jangkauan skala kota dan/atau regional sesuai dengan arahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031. Rencana pengembangan Kawasan Strategis Kota akan diwujudkan dalam bentuk Dokumen Tata Ruang Rinci Kawasan prioritas/Strategis dengan skala petanya 1:1000. Dokumen perencanaan ini merupakan tindak lanjut dari dokumen RDTRK

Kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kota Magelang sebanyak 4 kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar dan Alun-alun. Pada tahun 2014 dilaksanakan pengembangan salah satu kawasan strategis dan cepat tumbuh yaitu sentra ekonomi lembah tidar yaitu penataan pasar sidomukti. Target pengembangan di tahun 2014 sebesar 65% dan realisasi pencapaian target mencapai 100%.

- c. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh memerlukan perencanaan yang matang, waktu pelaksanaan yang relatif panjang dan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- d. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh harus benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan (masterplan) agar dapat terkendali meskipun terjadi perubahan kepala daerah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 216025.500,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.462.030.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 14,77% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur transportasi angkutan darat, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Targe Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Ketersediaan/jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	75%	75%	85%	85%	100,00%	85%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	75%	75%	80%	80%	100,00%	80%
3	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	70%	70%	75%	75%	100,00%	75%
4	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	50%	65%	65%	65%	100,00%	1 buah
5	Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	80%	85%	85%	85%	100,00%	90%
6	Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	75%	80%	85%	85%	100,00%	90%
7	Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	9.138 KBWU	10721 KBWU	2218	10110	455,82%	2218
8	Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	90%	3,20%	5%	2,59%	51,80%	10%
9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	---	15 menit	30	15	150,00%	30
10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	sesuai perda	sesuai perda	36.000	40.300	111,94%	36000
11	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	9 buah	9 buah	13	9	69,23%	15
12	Rasio ijin trayek	1,06%	26%	0,82%	0,79%	96,34%	0,77%
13	Jumlah arus penumpang angkutan umum	---	2.987.572 orang	2.900.000	2.972.853	102,51%	177000
14	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	---	2.987.572 orang	2.900.000	2.972.853	102,51%	-
15	Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	---	2.987.572 orang	2.900.000	2.972.853	102,51%	177000
16	Pemasangan rambu-rambu	---	75%	75%	85%	113,33%	75%
17	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	---	90%	90%	95%	105,56%	90%
18	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	---	90%	90%	100%	111,11%	80%

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Targe Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
19	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	---	80%	80%	80%	100,00%	80%
20	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	---	60%	60%	60%	100,00%	60%
21	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	---	80%	80%	85%	106,25%	80%
22	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	---	90%	90%	90%	100,00%	90%
23	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	---	70%	70%	70%	100,00%	70%
24	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	---	30%	35%	35%	100,00%	35%
25	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	---	45%	50%	50%	100,00%	50%
26	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	---	45%	50%	50%	100,00%	50%
27	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	---	100%	100%	100%	100,00%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja						114,03%	

- b. APPIL atau lampu pemberi sinyal diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu sistem untuk mengatur arus lalu lintas khususnya di persimpangan. Teknologi yang digunakan dalam pengaturan arus lalu lintas kemudian saat ini telah dilengkapi *countdown timer* untuk lebih memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengguna jalan. Kelancaran dan keamanan mengemudi saat melintasi simpang

sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia pada simpang tersebut. Ketersediaan/jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL) di Kota Magelang saat ini sebesar 85%.

Pemasangan rambu-rambu secara umum di Kota Magelang telah mencukupi kebutuhan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Rambu-rambu yang dimaksudkan sangat banyak macamnya. Pemerintah Kota Magelang setiap tahun mengupayakan adanya penambahan maupun penggantian rambu-rambu yang rusak.

Sebagai bagian dari sistem transportasi angkutan umum, maka keberadaan terminal sangat diperlukan. Kondisi terminal Kota Magelang saat ini masih perlu dilakukan pembenahan baik dari kondisi fisik maupun non fisik seperti banyaknya kerusakan pada infrastruktur dan belum optimalnya pengoperasian pada layanan sirkulasi penumpang dan angkutan umum. Bangunan dari terminal maupun jalan di terminal mempengaruhi kelancaran operasinya terminal yang mengurangi kenyamanan bagi pengguna terminal. Namun Kota Magelang saat ini sudah memiliki DED untuk perbaikan terminal agar sesuai dengan standard. Perlu dilakukan upaya pembenahan terminal melalui pengembangan fasilitas terminal sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jasa angkutan umum.

Sub terminal juga memiliki peran yang cukup strategis dalam sebuah sistem transportasi angkutan umum. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata di Kota Magelang pada Tahun 2014 sebanyak 2 buah yaitu Sub Terminal Kebonpolo dan Sub Terminal Rejomulyo. Sub terminal berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Kondisi kedua sub terminal ini masih perlu penataan lebih serius mengingat fungsinya semakin berkurang sebagai sebuah sub terminal.

Tempat pemberhentian angkutan umum seperti halte dan sub terminal menjadi alternatif bagi para penumpang yang lokasinya jauh dari terminal. Indikator jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan atau halte ini telah ditetapkan dalam RPJMD, namun dalam perjalanan waktu indikator jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum tidak dilanjutkan. Hal ini dikarenakan penyesuaian indikator urusan perhubungan dengan SPM yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan. Merujuk pada target yang ditetapkan pada RPJMD dan kondisi pada tahun 2014, jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang masih belum memenuhi target. Sarana tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang sampai pada tahun 2014 masih dikatakan belum memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Magelang pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Jumlah arus penumpang angkutan umum dimaksud adalah penumpang yang masuk/keluar daerah melalui terminal. Angka yang ditargetkan dalam RPJMD untuk tahun akhir 2015 perlu dikoreksi karena target tidak sesuai dengan realisasi selama 5 tahun berjalan disebabkan pada penyusunan target belum menggunakan pengertian sesuai dengan peraturan. Target yang ditetapkan menggunakan persepsi penumpang angkutan kota sementara yang dimaksudkan dalam SPM merupakan jumlah arus penumpang keluar masuk daerah.

Agar memberikan rasa aman bagi penumpang, maka setiap armada angkutan umum wajib mengantongi ijin KIR. Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Melihat jumlah kendaraan yang melakukan uji kir, indikator ini sudah mencapai target karena angka realisasi sudah lebih dari angka target kendaraan bermotor wajib uji. Lebihnya jumlah kendaraan yang melakukan uji kir di Kota Magelang salah satunya dikarenakan masih terdapat banyak kendaraan yang melakukan numpang uji. Faktor yang mendukung pencapaian dari indikator ini adalah sudah adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Uji Kendaraan dan adanya Peraturan walikota tentang SOP pelaksanaan uji kendaraan juga adanya pembinaan Organda. Waktu pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) untuk satu unit kendaraan dapat diselesaikan rata-rata dalam 15 menit.

Rasio kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Magelang pada tahun 2014 sebesar 2,59 % . Indikator ini didapatkan dari rumus Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun 2014 dibagi dengan jumlah seluruh angkutan umum pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin kecil rasio kepemilikan KIR maka capaian kinerja indikator tersebut semakin baik. Capaian ini melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 5 %.

Selain KIR, angkutan umum yang beroperasi juga harus memiliki izin trayek yang merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Realisasi indikator rasio ijin trayek sampai tahun 2014 belum memenuhi target yaitu 0,79% dari target pada tahun 2014 sebesar 0,82%. Angka rasio ini diperoleh melalui perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Menurunnya angka rasio ijin trayek dikarenakan adanya pembatasan usia kendaraan dalam pemberian ijin trayek yang mengakibatkan jumlah kendaraan umum menurun. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Magelang memiliki ijin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan, dan pengendalian trayek angkutan umum

Seperti halnya terminal penumpang, keberadaan terminal barang yang merupakan prasarana transportasi jalan yang digunakan untuk keperluan bongkar dan muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi juga sangat dibutuhkan. Namun sayangnya, Kota Magelang saat ini sudah tidak mempunyai terminal barang yang beroperasi sesuai dengan fungsinya. Terminal barang yang ada sudah tidak berfungsi karena saat ini digunakan untuk samsat cepat dan posko patwal.

Bagi masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, maka ketersediaan tempat parkir menjadi sangat penting. Penyediaan parkir diupayakan sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan parkir yang tidak memadai dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas karena berkurangnya lebar efektif jalan. Kondisi saat ini masih terdapat pelanggaran parkir di Jalan Tidar dan di Kawasan Aloon-aloon. Pemerintah Kota sudah melakukan beberapa upaya dalam menjaga ketertiban parkir. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang jasa umum juga telah ada.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum disediakan untuk menjamin kenyamanan pengguna jalan. Beberapa titik disediakan parkir di tepi jalan umum. Indikator ini ditetapkan dalam RPJMD, namun dalam perjalanannya indikator ini tidak dilanjutkan karena menyesuaikan dengan indikator dengan SPM bidang Perhubungan. Pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Magelang masih mengalami banyak masalah sehingga harus lebih diperhatikan.

Untuk indikator Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sebagaimana tersebut dalam matrik diatas (indikator sasaran nomor 17 -27) pada tahun 2014 yang merupakan tahun terakhir pencapaian SPM tersebut telah tercapai 100% sebagaimana disebutkan dalam laporan pencapaian SPM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang.

- c. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
- 1) Belum adanya grand design transportasi di Kota Magelang sehingga pengembangan sistem transportasi masih bersifat sporadis dan parsial.
 - 2) Tingginya volume kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terutama pada jam-jam sibuk seringkali menimbulkan kemacetan.
 - 3) Kesadaran/disiplin masyarakat pengguna jalan yang masih kurang terhadap rambu-rambu lalu lintas.
 - 4) Kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum yang masih rendah.
 - 5) Masih terdapat pengelolaan parkir liar.
 - 6) Pelanggaran parkir masih terjadi di Kota Magelang seperti di Jl. Tidar dan kawasan aloon-aloon.
 - 7) Perilaku angkutan umum menunggu penumpang di beberapa tempat yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
 - 8) Jumlah penumpang angkutan umum menurun karena semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.
- d. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- 1) Perlu disusun grand design transportasi di Kota Magelang agar pembangunan sektor transportasi di Kota Magelang dapat dilaksanakan secara komprehensif.
 - 2) Perlu adanya rekayasa lalu lintas untuk mengatasi jam-jam sibuk (peak hour).
 - 3) Perlu pembuatan Zona Selamat Sekolah di beberapa titik.
 - 4) Kerjasama antara stakeholders yang terkait dengan Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat.
 - 5) Pelayanan dan juga sarana prasarana yang diberikan bagi pengguna angkutan umum perlu ditingkatkan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 5.983.575,00 dari anggaran sebesar Rp. 7.405.975.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 80,80 % dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar 114,03 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2013		Capaian Kinerja 2013	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8 buah	8 buah	8	8	100,00%	15
2	Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	11 buah	12 buah	13	13	100,00%	13
3	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	9 buah	13 kelompok	14	14	100,00%	17
4	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,07%	0,07%	0,0450%	0,0450%	100,00%	0,06%
5	Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	4 titik	6 titik	8	8	100,00%	5
6	Website milik pemerintah daerah	6 buah	11 buah	16	16	100,00%	16
7	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, website, tradisional, interpersonal, luar ruang.	10	12 kali 13 unit	12	12	100,00%	12
8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	10%	58%	70%	70%	100,00%	70%
		10 KIM	13 KIM	13	14	107,69%	13%
Rata-rata Capaian Kinerja						100,85%	

- b. Operator jaringan komunikasi seluler yang secara nasional atau terdapat di Indonesia sudah ada di Kota Magelang dalam kondisi baik. Target jumlah jaringan operator berdasarkan RPJMD adalah 15 buah, namun secara nasional sampai saat ini di Indonesia hanya terdapat 9 jaringan operator yang aktif dan 8 diantaranya sudah ada di Kota Magelang. Indikator ini tidak terlalu utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan disektor komunikasi. Hanya saja indikator ini dapat menggambarkan bahwa Kota Magelang merupakan pangsa pasar bisnis telekomunikasi yang cukup penting. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya seluruh operator jaringan seluler di Kota Magelang.

Media informasi yang terdapat di Kota Magelang sudah memenuhi target RPJMD sejumlah 13 jenis. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan indikator tersebut dalam penyediaan informasi melalui media informasi. Pemerintah Kota Magelang memiliki stasiun radio Magelang FM dan beberapa stasiun radio swasta sebagai wahana bagi masyarakat Kota Magelang untuk berperan serta dalam pembangunan daerah dengan cara memberikan aspirasi dan komunikasi melalui udara dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional di Kota Magelang dilakukan melalui media

interpersonal dalam bentuk ceramah antara lain melalui forum BAKOHUMAS yang dilaksanakan setiap bulan.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Kota Magelang mempunyai target pada tahun 2015 terdapat KIM di setiap kelurahan yaitu sejumlah 17 KIM. SPM menargetkan bahwa KIM adalah sejumlah kecamatan di Kabupaten/Kota. Dari 17 kelurahan yang ditargetkan oleh Kota Magelang, pada tahun 2014 sudah mencapai 14 buah KIM.

Pada tahun 2014, dari 14 (empat belas) KIM yang ada di Kota Magelang dapat difasilitasi, dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain : pelatihan dan pendidikan SDM, mengembangkan jaringan antar KIM, mendistribusikan bahan informasi untuk KIM serta mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintah

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kota Magelang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan semakin menjauhi angka target yaitu 0,059%. Pada tahun 2013 realisasi dari rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kota Magelang mencapai 0,045% yang sebelumnya pada tahun 2012 mencapai 0,07%. Pada Tahun 2014 juga masih berada diangka 0,045%. Hal ini seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi informasi. Namun demikian indikator ini tidak terlalu signifikan untuk mengukur keberhasilan pembangunan teknologi informasi.

Saat ini di Kota Magelang sudah terdapat 8 titik hot spot yang terpasang ruang terbuka publik di Kota Magelang diantaranya di Aloon-aloon Magelang dan Taman Kuliner Sejuta Bunga. Jumlah hot spot yang terpasang di Kota Magelang sudah melebihi target tahun 2015 yaitu 5 titik hot spot. Namun masih terdapat beberapa ruang publik di Kota Magelang yang juga perlu disediakan hot spot yaitu seperti di taman badaan dan terminal.

Dari 46 SKPD di bawah Pemerintah Kota Magelang, terdapat 16 SKPD yang sudah memiliki website. Namun pada perjalannya tidak dikelola dengan baik. Perhatian SKPD dalam membuat website masih kurang sehingga masih terdapat banyak SKPD yang belum memiliki website. Hal ini dipengaruhi oleh SDM yang terbatas untuk mengelola website. Diperlukan tenaga tersendiri yang bertugas dalam mengelola website termasuk mengisi web dengan informasi-informasi yang up to date. Sangat dimudahkan bagi SKPD dalam membuat website karena sudah disediakan sub domain bagi SKPD.

c. Permasalahan yang dihadapi

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Website yang dimiliki SKPD tidak dikelola dengan baik karena keterbatasan SDM dalam mengelola Website.
- 2) Belum semua ruang publik di Kota Magelang tersedia Hot Spot.

d. Evaluasi dan rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sebagai upaya untuk pencapaian sasaran kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Website SKPD harus dikelola secara baik untuk memberikan informasi kepada publik terkait tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal keterbatasan SDM yang mengelola, maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang lebih profesional.
- 2) Untuk menambah kenyamanan masyarakat hendaknya ruang-ruang terbuka publik dan fasilitas umum yang sering digunakan masyarakat dilengkapi dengan akses internet bebas biaya, meskipun tidak dipungkiri bahwa saat ini akses internet sangatlah mudah dan murah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.019.881.596,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.568.000,00. Presentasi realisasi anggaran sebesar 88,00% dihadapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,85%.

8. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja terciptanya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan wisata						
	- jumlah kunjungan wisatawan nusantara	971.163	845.182	1.119.267	988.622	88,33%	1119276
	- jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	453	4.469	89	5.565	6252,81%	89
2	Tingkat hunian hotel dengan:						
	- Rata-rata lama tinggal (mancanegara)	3-4 hari	2-3 hari	3-5 hari	2 - 3 hari	62,50%	3-5hari
	- Rata-rata lama tinggal (nusantara)	3-5hari	3-4 hari	3-6 hari	3 - 4 hari	77,78%	3-6 hari
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7.9%	3,31	8	3,5	43,75%	8
Rata-rata Capaian Kinerja						1305,03%	

Capaian kinerja :

Tahun 2014 = 10876% (sangat baik)

Tahun 2013 = 172,40% (sangat baik)

Tahun 2012 = 138,82% (sangat baik)

Tahun 2011 = 47,04% (kurang)

Promosi gencar-gencaran dengan slogan Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga dan agenda-agenda menyongsong Ayo Ke Magelang 2015 telah mampu meningkatkan secara signifikan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri dibandingkan tahun lalu, meskipun untuk kunjungan Wisatawan Dalam Negeri masih di bawah target. Rata-rata lama tinggal wisatawan belum dihitung, namun diasumsikan masih sama dengan tahun lalu.

Terjadinya penurunan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di Kota Magelang utamanya disebabkan menurunnya jumlah kunjungan ke Taman Kyai Langgeng, sebagai destinasi utama Kota Magelang. Turunnya jumlah wisnus mengakibatkan turunnya jumlah pendapatan dari obyek wisata Taman Kyai Langgeng dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 12.543.406.690,00 (turun 2 milyar lebih).

Sedangkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kota Magelang terjadi karena adanya even tingkat Internasional yang diselenggarakan di Kota Magelang, salah satunya adalah kejuaraan Golf se Asia Tenggara yang diselenggarakan di Borobudur Internasional Golf. Selain itu wisatawan asing juga banyak tertarik mengunjungi Museum dan berbagai peninggalan benda cagar budaya di Kota Magelang seperti bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda.

Jumlah wisnus seharusnya meningkat setelah dikembangkannya Obyek Wisata Baru yakni Situs Pemakaman di Puncak Gunung Tidar. Obyek baru ini merupakan wisata sejarah/religi yang diperkirakan dalam tahun 2014 mampu menyedot wisnus 2.000 setiap bulannya.

Destinasi pariwisata yang selama ini diandalkan mampu menarik wisatawan berkunjung ke Kota Magelang masih bertumpu pada Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. Selain Taman Kyai Langgeng, Kota Magelang juga memiliki berbagai destinasi pariwisata yang potensial, seperti wisata ziarah Gunung Tidar, dan Sendang Tuk Drajat. Beberapa museum melengkapi fasilitas pariwisata, seperti museum Diponegoro, Museum Abdul Jalil, Musium Bumi Putera, Museum BPK RI, Museum Sudirman, dan Museum lukisan Oei Hong Djien (OHD). Kota Magelang juga kaya berbagai peninggalan kolonial Belanda yang apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi destinasi wisata sejarah dan menarik wisatawan berkunjung.

Wisata kuliner saat ini merupakan salah satu wisata yang dapat diandalkan mengingat banyak makanan di Kota Magelang yang cukup terkenal dan digemari. Berbagai sentra kuliner saat ini banyak dibangun di Kota Magelang seperti Sentra Kuliner Tuin Van Java di Alun-Alun, Sejuta Bunga di Shopping, Kartika Sari di Jalan Tidar, Badaan di Taman Badaan, dan Jendralan di Jalan Jendralan. Ke depan masih akan dibangun beberapa sentra kuliner lagi untuk menata dan memadai berbagai PKL yang saat ini masih tersebar di beberapa tempat di Kota Magelang

Pembentukan UPTD Pengelola Gunung Tidar di akhir tahun 2014, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang lebih serius mengembangkan obyek ini. Masterplan pengembangan dari ring inti hingga ring pendukung pun telah dibuat.

Selain itu pengembangan kawasan Situs Mantyasih juga telah dibuat masterplannya dalam rangka menambah obyek wisata di Kota Magelang yang masih minim.

Indikator nomor 1, 2, 3, 7 dan 8 belum dapat dihitung karena data yang sangat terbatas.

Promosi dan informasi pariwisata baik ke dalam dan luar negeri telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet atau website, melalui media leaflet, booklet, serta melalui expo atau pameran-pameran baik yang berskala provinsi maupun nasional. Gebyar pameran/expo tingkat nasional yang diikuti adalah:

1. Pekan Raya Sulawesi Selatan;
2. Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta;
3. Festival Kuliner di Jakarta.

Dari sisi prestasi, dua Duta Wisata Kota Magelang yang mewakili ajang pemilihan di tingkat provinsi terpilih sebagai Juara 1 Putra Duta Wisata Jawa Tengah atas nama Purwo Nur Hidayat dan Juara 2 Putri Duta Wisata Jawa Tengah atas nama Regita Dwicahya Rifati Ningrum.

Berdasarkan kondisi capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2014 sebagaimana tabel di atas kinerja urusan pariwisata tergolong masih rendah karena tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan tahun 2014. Apabila dihadapkan dengan target 2015, maka 1 target yaitu jumlah kunjungan wisata optimis akan tercapai, sedangkan 1 target lainnya yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB memerlukan upaya keras untuk memenuhi target. Demikian pula dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB capaiannya hanya sebesar 3,5% kurang dari 50% dari target 8% pada tahun 2014. Capaian kinerja indikator ini terpaut jauh dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 8% sehingga perlu upaya keras untuk mencapainya.

b. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Persaingan destinasi pariwisata dengan daerah sekitar, misalnya transit wisatawan asing lebih memilih tempat di Yogyakarta yang lebih dahulu maju dan memiliki historis bangsa yang dipandang lebih tinggi.
- 2) Jumlah obyek wisata sangat minim.
- 3) Minat wisatawan terhadap obyek wisata sejarah dan wisata religi yang beberapa tahun lalu makin menurun, telah meningkat dengan dibukanya Gunung Tidar sebagai Obyek Wisata Religi. Namun masih dibutuhkan anggaran yang besar untuk dapat mewujudkan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai.
- 4) Sulitnya menginventarisir wisatawan minat baru seperti wisata kuliner, wisata taman kota, wisata event/pertunjukan, wisata belanja dan lain-lain.
- 5) Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi dan promosi pariwisata
- 6) Masih belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona.
- 7) Masih rendahnya kualitas profesionalisme SDM bidang pariwisata.
- 8) Minimnya anggaran untuk promosi pariwisata dan pembangunan obyek wisata baru.

c. Evaluasi dan rekomendasi

- 1) Monitoring evaluasi dengan kajian mendalam perlu secara terus menerus dilakukan seiring dengan perkembangan kepariwisataan yang dinamis cepat berubah. Jajak pendapat (brainstorming) dengan berbagai pihak menjadi instrumen informasi dan aspirasi yang sangat penting.

- 2) Wisata kuliner, wisata taman kota, wisata efent/pertunjukan dan bentuk wisata-wisata baru lainnya yang makin berkembang, perlu diimbangi dengan inventarisasi atas jumlah wisatawan dan penerimaan devisa. Formula untuk ini sampai saat ini belum dirancang.
- 3) Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata harus terus ditingkatkan melalui pengembangan diversifikasi, kreasi dan inovasi wahana, peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, serta peningkatan kualitas SDM pariwisata.
- 4) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak baik itu para pelaku pariwisata, dunia usaha, akademik maupun dengan berbagai komponen masyarakat kreatif terus ditingkatkan, yang disertai dengan pelatihan-pelatihan di bidang kepariwisataan.
- 5) Aktivasi TIC, promosi pariwisata berbasis android, website.
- 6) Pasal 15 PP 96/2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Th.2009 mengamanatkan bahwa pelayanan perizinan terkait berusaha (investasi) agar dilaksanakan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- 7) Pelimpahan wewenang untuk perizinan/non perizinan bidang kepariwisataan belum diberikan oleh Walikota kepada BP2T maupun Disporabudpar.
- 8) Pada tahun 2014 telah disusun Raperda tentang Kepariwisata yang isinya juga mengatur tentang perizinan usaha di bidang

Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini adalah Rp 853.044.000,00 dengan penyerapan 87,47% pada Program Pengembangan pemasaran pariwisata, Program Pengembangan Destinasi pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan. Pada tahun sebelumnya sebesar Rp 610.891.000,00 dengan penyerapan 98,82%. Penyerapan anggaran tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2013, yang disebabkan adanya 1 kegiatan yang tidak maksimal yakni kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata yang hanya terserap 65,17%. Dimana anggaran untuk hotel yang semula 1 orang 1 kamar digunakan untuk 2 orang 1 kamar, sehingga anggaran dapat diefisienkan.

9. Terdatanya lembaga/kelompok seni dan budaya

- a. Program, kegiatan dan anggaran pendukung pencapaian sasaran
Pendataan atas kelompok seni tidak dianggarkan setiap tahun, namun mekanisme pelaporan/perizinan atas terbentuknya kelompok seni baru selama ini telah tersosialisasikan.
- b. Hasil evaluasi capaian kinerja terdatanya lembaga/kelompok seni dan budaya, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	162	163	164	164	100,00%	164

Sumber : Disporabudpar

- c. Pada tahun 2014 terdapat penambahan 1 kelompok seni budaya dari tahun lalu yang berjumlah 163 kelompok yakni Grup Seni Topeng Ireng di Kelurahan Magersari. Berbagai kelompok seni dan budaya ini tersebar di seluruh wilayah kelurahan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan di instansi pemerintah maupun swasta. Kelompok seni dan budaya tersebut meliputi kesenian jatilan, kunthulan, topeng ireng, ndhayakan, drum band, kubro siswo, kethoprak, reog, lawak, karawitan, keroncong, rebana/kasidah, orkes melayu/dangdut, campursari, sanggar tari, sanggar seni lukis/rupa/pahat, wayang kulit, seni dekorasi, teater, band dan lain-lain.
- d. Permasalahan yang dihadapi
Aktivitas kelompok seni budaya belum terinventarisir dengan baik, disinyalir ada beberapa kelompok yang sudah tidak beraktivitas lagi, karena terjadinya pasang surut minat masyarakat terhadap suatu kesenian yang diikutinya.
- e. Evaluasi dan rekomendasi
Inventarisasi sebaiknya dilakukan secara periodik setiap tahun.
Mekanisme pelaporan harus diupayakan secara tertib dilakukan oleh semua kelompok seni budaya kepada pemerintah.
Terdapat penambahan 1 kelompok seni budaya dari tahun lalu yang berjumlah 162 kelompok.

10. Terwujudnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja pembinaan lembaga/kelompok seni dan lembaga, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah festival seni dan budaya.	3	5	4	5	125,00%	4
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	2	1	50,00%	2
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	5	5	100,00%	5
4	Cakupan kajian seni 50%	---	25%	40%	53%	132,50%	40%
5	Cakupan fasilitas seni 30%	---	20%	28%	85%	303,57%	28%
6	Cakupan gelar seni 75%	---	50%	70%	100%	142,86%	70%
7	Misi kesenian 100%	---	84%	90%	100%	111,11%	90%
8	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	---	18%	23%	62%	269,57%	23%
9	Cakupan tempat 100%	---	0%	50%	100%	200,00%	50%
10	Cakupan organisasi 34%	---	32%	34%	100%	294,12%	34%
Rata-rata Capaian Kinerja						172,87%	

Sumber : Disporabudpar

Capaian kinerja :

Tahun 2013 = 87,94%

Tahun 2012 = 98,18%

Tahun 2011 = 106,07%

- b. Festival seni budaya yang dilaksanakan/diikuti terdiri dari :
- 1) Pentas Seni di Hari Jadi Kota Magelang;
 - 2) Parade Seni tingkat Provinsi di Semarang;
 - 3) Parade Seni di Hari Jadi Semarang;
 - 4) Festival Kesenian Rakyat di Temanggung;
 - 5) Pentas Duta Seni di Jakarta.

Selain festival seni tersebut diatas beberapa pentas seni juga digelar dalam rangka momen-momen tertentu seperti pada rangkaian Peringatan HUT RI, Hari Ibu, Hari Buku (Fesbuk), Munas APEKSI dan lain-lain. Masyarakat atau kelompok-kelompok seni secara mandiri juga mengadakan beberapa kali pentas seni.

Dengan selesainya pembangunan gedung Sasana Bumi Kyai Sepanjang maka saat ini Pemerintah Kota Magelang telah memiliki satu buah gedung kesenian. Dalam gedung tersebut juga menyatu ada kantor untuk Dewan Kesenian Kota Magelang (DKKM). Selain gedung Sasana Bumi Kyai Sepanjang, beberapa tempat yang sering pula dipakai untuk pementasan kesenian antara lain : Gedung Wiwiro Widji Pinilih, Kompleks Eks Karesidenan Kedu, Gedung Wanita, Gedung Tri Bhakti, Alun-Alun Kota, Taman Kyai Langgeng, dan lain-lain.

Indikator nomor 4 s/d 10 merupakan indikator dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesenian yang ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Sebagai amanat atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintahan Kota Magelang telah melakukan berbagai kegiatan dan pendanaan di bidang seni budaya, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak : masyarakat, dunia usaha, seniman/budayawan, media massa dan juga kerjasama antar daerah.

Di sisi lain, swasta/masyarakat secara antusias telah bekerjasama dengan baik untuk berjalannya semua kegiatan. Sehingga target SPM secara signifikan dapat terlampaui.

Faktor-faktor penyebab tercapainya indikator tersebut adalah :

- 1) Cakupan kajian seni ditargetkan 8 kegiatan (53%) dapat tercapai, yakni berupa kegiatan sarasehan, diskusi, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi banding, inventarisasi, dokumentasi dan pengemasan bahan kajian.
- 2) Cakupan fasilitasi seni ditargetkan 5 kegiatan (71%) terealisasi 6 kegiatan (85%), yakni kegiatan-kegiatan penyuluhan, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi dan pendokumentasian.
- 3) Cakupan gelar seni 100% tercapai dengan 4 kegiatan meliputi : diselenggarakannya pagelaran, pameran, festival dan lomba.
- 4) Cakupan misi kesenian terealisasi 100% dalam bentuk pengiriman duta-duta seni dan peran serta dalam event-event regional maupun nasional.
- 5) Cakupan SDM kesenian ditargetkan 3 (38%) terealisasi 5 (62%) meliputi : adanya sarjana seni, pamong budaya, seniman/budayawan, insan media dan pengusaha.
- 6) Cakupan tempat sebesar 100% tercapai setelah selesainya pembangunan Gedung Kesenian Kyai Sepanjang.

- 7) Cakupan organisasi tercapai 100% yang mencakup tersedianya organisasi struktural yang menangani kesenian yakni Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata serta adanya Dewan Kesenian.

Dalam hal prestasi, dua prestasi di tingkat provinsi diraih, yakni :

- 1) Perwakilan Seni Tradisi Kota Magelang memperoleh Juara 2 dalam Festival Kesenian Tradisional di Jateng Fair;
- 2) Sanggar Tari "Arumsari" memperoleh Juara 2 dalam Lomba Seni Tari tingkat Provinsi di Semarang.

c. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Minat masyarakat terhadap suatu kesenian mengalami pasang surut.
- 2) Sebagian besar proposal permohonan bantuan hibah peralatan kesenian dari masyarakat baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBD Provinsi dapat terealisasi, namun terdapat beberapa penerima bantuan yang kurang tertib dalam menyampaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan (terlambat).
- 3) Program Ayo ke Magelang 2015 mengindikasikan bahwa efent-efent yang bersifat mengundang wisatawan akan makin banyak. Esensinya dari sisi aparatur adalah banyak kewajiban administratif maupun aktivitas kegiatan yang harus dilaksanakan/diselesaikan. Kuantitas dan kualitas personel yang ada saat ini dirasakan belum memadai.
- 4) Sarana dan prasarana dirasakan masih sangat kurang seperti perlengkapan-perengkapan pementasan, sarana mobilitas untuk pengiriman duta seni maupun pengangkutan property kesenian, peralatan dll.
- 5) Daya kreasi dan inovasi di bidang kesenian masih kurang.

d. Evaluasi dan rekomendasi

- 1) Sasana Bumi Kyai Sepanjang yang sudah selesai dibangun harus segera ditindaklanjuti dengan kejelasan SKPD pengelolanya, agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
- 2) Kapasitas personel aparatur, sarana prasarana dan anggaran perlu lebih dialokasikan secara memadai.
- 3) Hubungan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan para pelaku seni budaya harus selalu dijaga dan ditingkatkan.
- 4) Hasil karya cipta yang layak untuk dipatenkan harus diupayakan HAKI-nya.

Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2014 sebesar Rp 765.228.000,00 dengan penyerapan 97,72% pada Program pengembangan nilai budaya, dan program pengelolaan keragaman budaya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 952.390.000,00 dengan penyerapan 92,58%. Serapan anggaran sebesar 97,72 % dihadapkan dengan capaian kinerja sebesar 172,87% maka terjadi efiseiensi dalam pencapaian sasaran ini.

11. Terpeliharanya museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja terpeliharanya museum dan peninggalan purbakala serta cagar budaya yang berkelanjutan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersajii dalam tabel sebagaiberikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36 buah	36 buah	36	35	97,22%	36
2	Jumlah museum yang dikelola	1 unit	1 unit	1	1	100,00%	1
Rata-rata Capaian Kinerja						98,61%	

Sumber : *Disporabudpar*

Capaian kinerja :

Tahun 2014 = 98,61%

Tahun 2013 = 100%

Tahun 2012 = 100%

Tahun 2011 = 100%

Jumlah Cagar Budaya berkurang satu oleh karena terbakarnya bangunan kuno Klenteng Hok Bio.

Situs benda purbakala meliputi prasasti mantiasih, prasasti poh dan lainnya yang terkait dengan sejarah berdirinya Kota Magelang.

Peninggalan sejarah lainnya berupa makam Syeh Subakir, Kyai Semar, Kyai Sepanjang di puncak Gunung Tidar yang sering dikunjungi wisatawan, Sendang Drajat, Tuk Songo dan-lain-lain.

Bangunan peninggalan kolonial antara lain Water Torn di Alun-alun, Saluran Kali Kota Tembok Sungai Manggis, Mapolresta, Gereja St.Ignatius, Gereja Bayeman, Gedung Bunder, Gedung Eks Karesidenan Kedu, Gedung Rindam, Scaba, Masjid Agung dan sebagainya.

Terdapat 5 buah museum yang ada di Kota Magelang yakni :

1. Museum Abdul Jalil
2. Museum Diponegoro
3. Museum Sudirman
4. Museum Bumi Putera
5. Museum Badan Pemeriksa Keuangan

Dari 5 museum tersebut, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang adalah Museum Sudirman.

Selain Museum, juga terdapat beberapa galeri lukisan dan patung, antara lain di Gladiol dan yang terkenal adalah Galeri Oei Hong Djien (OHD).

b. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Sebagian besar benda cagar budaya dimiliki oleh masyarakat dan Instansi di luar Pemerintah Kota Magelang, sehingga rentan beralih fungsi bahkan dibongkar untuk dijadikan peruntukan lainnya seperti tempat usaha atau kegiatan lainnya.
- 2) Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah bangunan kuno yang ada di Kota Magelang yang harus dilestarikan, antara lain menurut Komunitas Magelang Kota Tua, Pecinta Magelang Tempo Dulu dan Pecinta sepeda kuno yang menyatakan bahwa jumlah bangunan kuno dimaksud ada lebih dari 120 buah. Sedangkan Pemerintah Kota Magelang saat ini mengkonservasikan sebanyak 36 bangunan kuno berdasarkan hasil survey dari Balai Konservasi Benda Purbakala Klaten, dimana bangunan tersebut dianggap memiliki nilai sejarah.

c. Evaluasi dan rekomendasi

- 1) Tahun 2013 telah terwujud Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya. Perda tersebut harus ditindaklanjuti dengan peraturan implementasinya.
- 2) Tahun 2014 disusun Peraturan Walikota Magelang tentang Pelaksanaan Perda tersebut. Setelah kedua Payung Hukum tersebut tersedia maka perlu segera ditindaklanjuti amanat-amanat yang ada didalamnya seperti : inventarisasi, pendataan/pendaftaran, penunjukan tim ahli, penetapan hingga registrasinya. Mekanisme perlu segera dijalankan untuk memenuhi harapan publik pengamat kesejarahan dan kepurbakalaan.
- 3) Perlu dilakukan inventarisasi benda, situs dan cagar budaya agar dapat diketahui secara tepat dan benar.
- 4) Diperlukan mekanisme pelestarian berbagai benda, situs dan kawasan cagar budaya baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.
- 5) Pandangan atas pemeliharaan peninggalan purbakala dan cagar budaya semestinya tidak hanya fisik belaka, namun sisi sejarah yang mengandung nilai budaya yang tinggi harus pula dilestarikan. Ada banyak riwayat penting yang belum dituliskan/dibukukan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka sejarah itu akan hilang seiring dengan wafatnya orang-orang yang menjadi saksi sejarah atau pewaris kisahnya. Riwayat sejarah sekecil apapun perlu segera dikumpulkan dan dibukukan.

Total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 407.705.000 dengan penyerapan 94,53% pada program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. . Sedangkan pada tahun 2013 anggaran sebesar Rp 610.891.000,00 dengan penyerapan 98,82%.

12. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	5,47 buah	5,47%	65,00%	65%	100,00%	70%
2	LPM berprestasi	11,76%	17,65%	16,17%	28%	173,16%	17%
3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	60,94%	31,99%	96,00%	100%	104,17%	100%
4	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	80%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%
5	Terlaksananya BBGRM di 17 kelurahan	100%	100%	55,00%	100%	181,82%	55%
Rata-rata Capaian Kinerja						131,83%	

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Magelang, 2014, data diolah

- b. Dari tabel di atas nampak bahwa Sasaran Misi keempat terkait dengan Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah mencapai target bahkan melampaui di tiap komposit indikator pembentuknya. Kelim aindikator masing-masing Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat, LPM berprestasi, Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan BBGRM di 17 kelurahan telah secara memuaskan tercapai pada tahun 2014.

Meskipun demikian masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi untuk menjawab tantangan pemberdayaan masyarakat yang semakin kompleks.

Indikator Kinerja yang pertama adalah rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok yang tumbuh dan berkembang dibawah atau bersama lembaga pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang di masing - masing kelurahan yang terdapat di Kota Magelang terdiri dari : a). Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sebanyak 17 lembaga ; b) Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) sebanyak 17 lembaga dan c) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 17 kelurahan.

LKK merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengelola keuangan bagi kemanfaatan masyarakat secara langsung.

LKM merupakan lembaga keswadayaan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan program nasional penanggulangan kemiskinan.

UPPKS merupakan kelompok yang dibentuk dalam rangka menyediakan wadah bagi masyarakat khususnya peserta Keluarga Berencana dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I untuk melakukan usaha ekonomi produktif.

Keseluruhan total realisasi indikator adalah mencapai 65 % atau secara tingkat capaian adalah 100 %. Dalam hal ini peran LPM dalam membina lembaga lembag tersebut semakin vital dan signifikan.

Indikator Kinerja utama yang kedua dari sasaran ini adalah jumlah LPM yang berprestasi. Indikator berprestasi dilihat melalui peran LPM dalam berbagai kegiatan di masyarakat, antara lain peran lembaga kemasyarakatan dalam bidang ekonomi (melalui partisipasi LPM dalam meningkatkan peran koperasi, pengembangan usaha mikro dan usaha kecil di kelurahan); bidang pembangunan fisik (melalui partisipasi dalam pembangunan/perbaikan jalan dan saluran lingkungan, sarana peribadatan, sarana olahraga, serta fasilitas umum lainnya); serta peran lembaga kemasyarakatan dalam turut menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan di kelurahan. Peran LPM sebagaimana tersebut diatas dinilai bersamaan dengan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan setiap tahun.

Target Capaian kinerja tahun 2014 dari indikator tersebut sebesar 16.17%, sedangkan capaian untuk tahun 2014 sebesar 28%, artinya tingkat capaiannya melampaui target sekitar 173 %.

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Bentuk swadaya masyarakat dapat dilihat dari berbagai dukungan masyarakat terhadap program pemerintah maupun swadaya masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

Adapun program kegiatan Pemerintah Kota Magelang yang dilaksanakan dan diharapkan dapat memunculkan swadaya masyarakat antara lain kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.530.000.000,00

Sebagaimana tabel indikator di atas total swadaya masyarakat mencapai 96 %.

Ke depan apabila dimungkinkan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat baik secara fisik maupun materiil sebagai bentuk swadaya, perlu dipertimbangkan perubahan mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran melalui hibah kepada masyarakat. Dengan pengalokasian anggaran dalam rekening belanja sesuai dengan ketentuan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara langsung oleh warga masyarakat sehingga seluruh pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ini dipegang masyarakat, dan semangat untuk melaksanakan kegiatan lebih tinggi. Meskipun dimungkinkan terdapat sisi kelemahan, misalnya terkait pengendalian pelaksanaan kegiatan, namun kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal dan kendala tersebut masih dapat ditanggulangi dengan pengawasan secara intensif.

Selanjutnya terkait adanya peningkatan anggaran Program pemberdayaan masyarakat di tahun 2014 menunjukkan adanya perhatian khusus dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program tersebut, dan meningkatnya swadaya masyarakat menunjukkan adanya peningkatan partisipasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

Indikator Kinerja Utama yang keempat adalah pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Pemeliharaan disini diartikan sebagai peran masyarakat dalam turut memelihara hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan melalui TMMD dan pembangunan yang dilaksanakan melalui program PNPM. Adapun target tahun 2014 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan kinerja 100%, artinya dari keseluruhan hasil pembangunan tersebut belum semuanya dilanjutkan dengan pemeliharaan oleh warga. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pembangunannya, kegiatan-kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara langsung oleh warga artinya ada kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat, namun masih ada yang dilaksanakan oleh rekanan/pihak ketiga. Apabila kita lihat peran masyarakat dalam pemeliharaan, lebih pada kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dibandingkan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah Terlaksananya BBGRM di 17 kelurahan. BBGRM atau Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, harmonisasi lembaga yang ada di masyarakat dengan pemerintah serta untuk memotivasi munculnya swadaya masyarakat. Pada tahun 2014 seluruh kelurahan se Kota Magelang melaksanakan BBGRM, dan mengalokasikan kegiatan BBGRM ini dalam

DPA masing-masing kelurahan, sehingga dari target tahun 2014 sebesar 55% realisasi 100% dan capaian kinerja 182%.

- c. Permasalahan yang dihadapi
 - 1) Keberadaan LPM masih belum optimal untuk menghadapi tantangan pemberdayaan masyarakat yang semakin kompleks.
 - 2) Perlunya peningkatan kinerja atas tugas sebagai pengurus LPM.
 - 3) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat belum optimal karena masih ada peran pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
- d. Evaluasi dan Rekomendasi

Dari analisis capaian di atas nampaknya perlu dilakukan evaluasi yang kontinyu dan peningkatan performance atas stakeholders yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan meskipun capaiannya sudah cukup baik hingga tahun 2014. Beberapa poin rekomendasi antara lain :

 - 1) Pembinaan dan pemberdayaan pada pengurus LPM sendiri menjadi semakin krusial untuk dilaksanakan serta regenerasi pengurus seperlunya.
 - 2) Perlunya porsi yang lebih tinggi bagi peran masyarakat dalam pemeliharaan paska program.

13. Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologiterapan masyarakat,dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna)	0	0	85%	86%	101,18%	30%
2	Jumlah Krenova yang terdata	25	28	14	17	121,43%	15
Rata-rata Capaian Kinerja						111,30%	

- b. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama yang pertama untuk sasaran Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat, yaitu kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna) perlu kami sampaikan bahwa TTG merupakan teknologi yang diciptakan dan dikembangkan serta ditindaklanjuti dengan pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat. Penciptaan teknologi ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mendasar hal tersebut, maka penemuan yang difasilitasi melalui Kantor Litbang ini seharusnya ditindaklanjuti dengan pemanfaatannya di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian IKU di tahun 2014telah melampaui target. Dari target 85 % terrealisasi sebesar 86 % dengan tingkat capaian 101 %. Meski capaian indikator sudah melemapui target namun ke depan perlu diupayakan agar pemanfaat teknologo tepat guna hasil riset dan pengembangan dapat diakses seluas-luasnya kepada masyarakat dan dapat dipergunakan secara luas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi telah

mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi di daerah. Sejalan dengan amanat peraturan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat, Pemerintah Kota Magelang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan berinovasi seluas-luasnya di bidang iptek.

Untuk mengeksekusi hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Riset Unggulan Daerah dan kegiatan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) yang dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

Kegiatan RUD tahun 2014 bertema “Peningkatan Kualitas layanan dasar masyarakat dalam memantapkan keunggulan kompetitif Daerah”, dan bagi 3 pemenang riset diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- yang berasal dari APBD Kota Magelang. Pada tahun 2014 ini kegiatan RUD diikuti oleh 8 peneliti baik individu maupun kelompok, dengan judul penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Riset Unggulan Daerah (RUD) Kota Magelang tahun 2014

No.	Judul	Ketua Tim	Instansi
1	2	3	4
1.	Unjuk kerja mesin pencacah sampah organik skala rumah tangga	Catur Pramono, S.T., M.Eng.	Universitas Tidar Magelang
2.	Evaluasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat (studi kasus di kampung organik Legok Makmur)	Ns. Robiul Fitri Masithoh, S.Kep	Universitas Muhammadiyah Magelang
3.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan manajemen partisipatif-kolaboratif (Parko) “Studi kasus di Kampung Legok Makmur Kalisari Rw. 08 di Kel. Wates Magelang Utara”.	Dwi Ariyani	SMA N SMA N 5 Magelang
4.	Pemanfaatan sampah sebagai energi listrik dengan metode Galdaf Studi Kasus TPA Banyu Urip.	Wahyu Nugroho	PT. PLN Rayon Borobudur
5.	Persepsi masyarakat tentang Magelang Kota Sejuta Bunga (Studi tentang persepsi masyarakat terhadap city branding Kota Magelang.	Dra. Eny Boedi Orbawati	Universitas Tidar Magelang
6.	Persepsi Masyarakat tentang Magelang Kota Sejuta Bunga	Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd	Universitas Muhammadiyah Magelang
7.	Mewujudkan Magelang Kota Sejuta Bunga dengan program yang efektif dari pemerintah baik sipil atau militer juga peranan aktif masyarakat di dalamnya.	Akhmad Rosyid Farkhani	Perorangan
8.	Persepsi dan perilaku masyarakat tentang Magelang Kota Sejuta Bunga.	Tri Minarni, S.Pt., S.Pd	SMA N 4 Magelang

Sumber Kantor Litbang dan Statistik, 2014

Terdapat 3 fokus dalam RUD Tahun 2014 yaitu :

1. Untuk Persepsi masyarakat tentang Kota sejuta Bunga terdiri dari 4 (empat) judul.
2. Untuk Evaluasi Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat (*studi kasus di kampung legok makmur*) terdiri dari 4 (empat) judul.
Dua fokus tersebut tercermin dalam tabel di atas
3. Fokus Penelitian tentang Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang

Adapun pemenang riset adalah :

- 1) Persepsi dan Perilaku Masyarakat Magelang Tentang Kota Sejuta Bunga.
- 2) Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik.
- 3) Kajian Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang.

Selanjutnya terkait dengan Indikator Kinerja Utama yang kedua untuk sasaran meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat yang sekaligus merupakan bentuk nyata dari peluang yang diciptakan Pemerintah Kota Magelang yang kedua adalah kegiatan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) dengan indikator jumlah krenova yang terdata.

Terkait dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2014 yaitu 12 peserta ternyata terdapat 17 peserta sebagaimana tersaji dalam tabel.

Tabel 3.7
Hasil Penjaringan/Pendataan Kreasi dan Inovasi (Krenova) Masyarakat Kota Magelang Tahun 2014

No	Judul	Nama Penemu	Instansi
1	Bunga Penguji Boraks Dalam Makanan	Sun Sumitriyah, S.Pd.	PNS SMKN1
2	Teknik Pewarnaan Kain Kreasi dan Inovasi Warna Alam	Sylvia Eriana Dewi	Umum
3	Kerajinan Kertas	Retno Indriyati	Umum
4	Tabela Cerdas	Sam Wahyono	PNS Dispertan
5	Modifikasi Pangan Lokal Blendung Menjadi Brownies yang Bernilai Gizi Khas Kota Magelang	1. Maskanatul Maulida; 2. Erlin Prastiyawati; 3. Ardyan Satria PP	SMAN3
6	Optimalisasi Perekonomian Melalui Kersajimar Sebagai Inovasi Olahan Khas Magelang	1. Zulfa Fatmawati DA.; 2. Meilia Qurrota A'yun; 3. Tiana Ayu Prima	SMAN3
7	Keju Sari Kacang Hijau dengan Cuka Limbah Apel	1. Andre Yulianto; 2. Vina Janis Saputri	SMAN3
8	Topeng Las Otomatis	Mamik Yunanto, ST	PNS SMKN1
9	Puding Sakusa sebagai Alternatif Makanan Sehat	1. Maria Christina; 2. Leonard Tantripal	SMAN3
10	Modifikasi Ubuntu 10.04 Menjadi Alif Linux Sebagai Solusi Meminimalisir Pembajakan Windows	Rizal Pahlevi	Umum

No	Judul	Nama Penemu	Instansi
11	Optimalisasi Pupuk Organik Cair dengan Memanfaatkan Tape Singkong	1. Bina Artika Priyantari; 2. Anggoro Chandra Y.	SMAN3
12	Pemanfaatan Limbah Untuk Souvenir untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Drs. Catur Sawahyo	PNS Disporabudpar
13	Sistem Kendali Robot Berkamera untuk Pemantau Ruangan Berbasis Web	Astri Wuragil	PNS SMAN5
14	Produksi Makanan Dessert dengan Tyrosin dan Tryptofan untuk Mencerdaskan Otak	Rizal Pahlevi, cs	Umum
15	Palu Terapi	Untung	Umum
16	Memasyarakatkan Kalender Qomariah (Hijriyah) dari Sudut Pandang Astrofisika	Rizal Pahlevi, cs	Umum
17	Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Produksi Yoghurt dan Cuka dengan Katalisator Audiosonik	Rizal Pahlevi, cs	Umum

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2014

c. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Perlunya optimalisasi hasil riset untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.
- 2) Perlunya perencanaan secara jangka menengah maupun panjang terkait dengan blue print riset yang dilakukan.
- 3) Perlunya peningkatan core competency dalam melaksanakan core business kelitbang dalkam skema Sisten Inovasi Daerah (SiDA).

d. Evaluasi dan Rekomendasi

- 1) Mengoptimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan komunikasi dengan kelurahan dan tokoh masyarakat dalam rangka menjaring potensi teknologi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan.
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Penelitian dan Pengembangan dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan RUD.
- 3) Melakukan langkah langkah terkait penguatan SiDA di Kota Magelang.

14. Terwujudnyapengembangan kegiatan ekonomi masyarakat

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja terwujudnya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat,dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagaiberikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	35,29%	52,94%	65%	52,94%	81,45%	70%

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Magelang, 2014, data diolah

- b. Indikator Kinerja Utama Sasaran Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yaitu Jumlah LKK dan Lembaga Keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas. LKK dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria:
- 1) Lengkap secara kelembagaan, susunan organisasi dan susunan pengurus.
 - 2) Ketertiban administrasi, tertib dalam melaksanakan administrasi pendukung dan dari sisi manajemen pengelolaan tertata dengan baik, misalnya dalam pelaksanaan dana bergulir semua tertib dalam mengembalikan dana, dan penggunaan dana tersebut benar-benar untuk meningkatnya usaha.
- Dari target yang dicanangkan pada tahun 2014 sebanyak 65% LKK yang sehat, namun realisasinya padatahun 2014 baru sebanyak 60%.
- c. Permasalahan yang dihadapi
- 1) Kurang tertibnya administrasi kelembagaan dan pengurus.
 - 2) Manajemen pengelolaan LKK masih belum optimal.
 - 3) Masih terjdaknya non performance loan dalam pelaksanaan pengkuliran dana.
- d. Evaluasi dan Rekomendasi
- Diperlukan suatu mekanisme evaluasi dan monitoring yang memberikan efek baik bagi peningkatan kinerja LKK.
- Peningkatan operasional LKK yang pada tahun 2014 sebesar Rp 1.920.000,- per LKK harus diimbangi dengan peningkatan kinerja layanan, administrasi dan kinerja Indikator Kinerja Utama untuk sasaran.
- Alokasi anggaran sebagai pendukung dari indikator ini adalah program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan anggaran sebesar Rp. 82.775.000,0 dengan realisasi sebesar Rp. 82.125.000,- dengan serapan sebesar 99,22.

15. Terwujudnya review pokjnal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi

- a. Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Terwujudnya review pokjnal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi adalah posyandu aktif dan jumlah posyandu yang berprestasi.
- Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Terlaksananya review pokjnal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 108.616.000,- yang terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu dan Pengobat Tradisional sebesar Rp. 21.700.000; Kegiatan Pembinaan Kepada Lanjut Usia dan Keluarganya sebesar Rp. 67.025.000; dan Kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR sebesar Rp. 19.891.000,-
- b. Hasil evaluasi capaian kinerja Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Capaian Kinerja	Tahun 2013	Capaian Kinerja	Tahun 2014		Capaian Kinerja	Target
		Realisasi	2012	Realisasi	2013	Target	Realisasi	2014	2015
1	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
2	Jumlah posyandu yang berprestasi	1,04%	100%	1,56%	100%	2,08%	0,51%	24,52%	2,58%
Rata-rata Capaian Kinerja								62,26%	

- c. Indikator Kinerja Utama yang pertama adalah Posyandu Aktif, dengan realisasi jumlah posyandu aktif tahun 2014 sebanyak 196 buah atau sebesar 100% sama dengan tahun 2013. Dari 196 Posyandu yang tersebar di Kota Magelang tersebut terbagi dalam 4 (empat) strata/tingkatan, yaitu : a). **Strata Pratama** sebanyak 10 posyandu; b). **Strata Madya** sebanyak 40 posyandu ; c). **Strata Paripurna** sebanyak 81 posyandu dan d). **Strata Mandiri** sebanyak 65 Posyandu. Apabila dilihat dari penyebaran posyandu menurut wilayah kecamatan, maka jumlah posyandu untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Magelang Utara : 47 posyandu
2. Kecamatan Magelang Tengah : 76 posyandu
3. Kecamatan Magelang Selatan : 73 posyandu

Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah jumlah posyandu yang berprestasi. Pada tahun 2014, penghargaan yang diraih antara lain Posyandu Puspowati Kelurahan jurangombo Utara dengan prestasi Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kota Magelang dan Juara II Lomba Posyandu Tingkat Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka capaian kinerja sasaran review Pokjandal Kader dan Pemilihan Posyandu Berprestasi pada tahun 2014 sebesar 24,52%.

16. Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis

- a. Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis adalah Jumlah rakor dan monev TKPK.
- b. dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebesar Rp. 39.900.000,- Kegiatan Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergi, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah rakor dan monev TKPK	9 keg	12 keg	7	7	100%	6

- d. Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini yaitu Jumlah Rapat Koordinasi dan Monev TKPK, tahun 2014 tercapai sebesar 100%.

TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang, yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Magelang No 400/39.a/112 Tahun 2010.

Tujuan dibentuknya TKPKD adalah :

- 1) Mempercepat target penurunan jumlah penduduk miskin.
 - 2) Meningkatkan efektifitas koordinasi (sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi) upaya penanggulangan kemiskinan melalui 4 kelompok/klaster program.
 - 3) Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah.
 - 4) Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan sebagai program bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- e. Meskipun pelaksanaan pertemuan TKPKD sudah lebih intensif dibandingkan tahun 2013, namun masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kota Magelang. Permasalahan umum yang dihadapi antara lain :
- 1) Akurasi data penduduk miskin perlu ditingkatkan mengingat beragamnya kriteria serta indikator dalam menentukan status penduduk miskin, hal ini berpengaruh terhadap penentuan sasaran, ketepatan sasaran berikut evaluasi keberhasilannya;
 - 2) Koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan /lembaga/SKPD belum optimal;
 - 3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan berkesinambungan.
- f. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah antara lain :
- 1) Penentuan kriteria serta indikator penduduk miskin yang seragam sehingga tidak ada perbedaan status penduduk miskin serta melaksanakan pendataan penduduk miskin melalui mekanisme yang benar dan berpedoman pada kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
 - 2) Mengoptimalkan kinerja TKPKD dalam rangka mensinergikan penyusunan kebijakan dan perencanaan program dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
 - 3) Memfokuskan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan dapat membuka peluang kerja.

17. Terwujudnya peningkatan kualitas program PNPM

- a. Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas program PNPM adalah jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik.
- Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas program PNPM, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 246.345.000,00 yang terdiri dari alokasi untuk Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 139.500.000,- dan alokasi untuk Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sanitasi sebesar Rp. 106.845.000,-

- b. Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya program PNPM, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik	15,00%	15,00%	17	17	100,00%	17

- c. Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini yaitu Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik, untuk tahun 2014 tercapai sebesar 100%, artinya semua LKM di 17 kelurahan dapat melaksanakan program dengan baik.

Terkait Indikator Kinerja Utama Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa setiap tahun dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh LKM di Kota Magelang oleh auditor independent yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.
- 2) Bahwa berdasarkan audit yang dilaksanakan atas pelaksanaan program tahun 2014 diperoleh hasil bahwa dari 17 LKM di Kota Magelang pada dasarnya telah melaksanakan kegiatan bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan dengan baik.

18. Terlaksananya PMTAS

- a. Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Terlaksananya PMTAS adalah Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Terlaksananya PMTAS, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Magelang khususnya di SKPD BPM, P dan KB sebesar Rp. 231.100.000,00 untuk Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin.

- b. Hasil evaluasi capaian kinerja terlaksananya PMTAS, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target Tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	760 anak	780 anak	400	809	202,25%	450

- c. Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini yaitu Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS, dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 400 anak, terealisasi 809 anak sehingga capaian kinerja dari Indikator ini sebesar 202,25%, apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat peningkatan sebanyak 29 anak dari realisasi sebanyak 780 anak, meskipun dari sisi prosentase terjadi penurunan namun dari jumlah anak yang mendapatkan PMTAS telah meningkat.

19. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

a. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014 BPMP dan KB Kota Magelang melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 721.299.000,- yaitu untuk mendanai program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 199.735.000, melalui kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 43.200.000,- Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan anggaran sebesar Rp. 78.811.000,- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 19.775.000,- Kegiatan Penyebarluasan Informasi pengarusutamaan gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 21.865.000,- serta Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.900.000,-
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 132.240.000, melalui Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.600.000 dan Kegiatan Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.640.000,-
- 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan, melalui Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.150.000,-
- 4) Program peningkatan peran perempuan di perdesaandengan anggaran sebesar Rp. 349.174.000, melalui Kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang ekonomi produktif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.475.000,- Kegiatan Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.321.000,- serta Kegiatan Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 262.378.000,-

b. Hasil evaluasi capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rasio KDRT	0,07%	0,038%	0,15%	0,018%	12%	0,16%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	15,69%	15,67%	63,23%	15,94%	25,21%	70,20%
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	29,19%	34,25%	44,11%	34,25%	77,65%	47,06%
4	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	0	0	100,00%	-

No	Indikator Sasaran	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		Capaian Kinerja 2014	Target tahun 2015
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,79%	61,25%	75%	60,55%	79,67%	77%
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	91,11%	100%	76%	32%	42,11	77%
7	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang men-dapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata-laksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	90%	85%	100,00%	117,6%	85%
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75,55%	90%	90%	100,00%	111,1%	90%
10	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	95,55%	100%	90%	100%	111,1%	90%
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	70%	100%	142,86%	70%
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	70%	100%	142,86%	70%
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	85%	100%	117,65%	85%
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	85%	100%	117,65%	85%
15	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	---	96,69%	80%	96%	120,00%	73%
Rata-rata Capaian Kinerja						372,42%	

c. Capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indikator yang pertama adalah terkait dengan Rasio KDRT. Pada tahun 2014 rasio KDRT sebesar 0,018% atau menurun sebesar 0,02% dibandingkan tahun 2013. Dengan capaian 12,00% dari target sebesar 0,15%.
- 2) Indikator kedua dari Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah. Capaian kinerja untuk indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2014 sebesar 15,94% atau mengalami peningkatan sebesar 0,27% dibanding tahun 2013 sebesar 15,67%. Apabila dilihat dari jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah pada tahun 2014 di Kota Magelang sebanyak 3.352 orang, terjadi kenaikan sebanyak 47 orang dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak 3.305 orang.

- 3) Indikator keempat dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK merupakan perbandingan jumlah kelompok PKK dengan jumlah PKK. Jumlah kelompok binaan sebanyak 616 kelompok, sedangkan jumlah PKK sebanyak 211, sehingga rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 34,25 % atau masing-masing PKK kurang lebih membina 2 – 3 kelompok.

Kelompok binaan PKK terdiri dari :

- 1) Dibawah Binaan kelompok Kerja I sebanyak 14 kelompok, yaitu PKPN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara) sebanyak 4 kelompok, Kadarkum (Keluarga sadar hukum) sebanyak 6 kelompok dan Pola Asuh sebanyak 4 kelompok.
- 2) Dibawah Binaan kelompok kerja II sebanyak 346 kelompok, yaitu :
 - a) PAUD sebanyak 40 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 15 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 19 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 6 kelompok.
 - b) BKB (Bina Keluarga Balita) sebanyak 56 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 13 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 36 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 7 kelompok.
 - c) UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sebanyak 223 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 158 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 48 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 17 kelompok.
 - d) Koperasi Berbadan Hukum sebanyak 27 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 1 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 17 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 19 kelompok.
- 3) Dibawah Binaan kelompok kerja III sebanyak 256 kelompok, yaitu :
 - a) Posyandu balita sebanyak 192 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 48 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 48 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 72 kelompok.
 - b) Posyandu lansia (lanjut usia) sebanyak 64 kelompok, di wilayah Kecamatan Magelang Utara 20 kelompok, Kecamatan Magelang Tengah 35 kelompok dan Kecamatan Magelang Selatan 9 kelompok.
- 4) Indikator kelima dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah persentase tenaga kerja dibawah umur.

Jumlah tenaga kerja dibawah umur di Kota Magelang tahun 2014 0, atau tidak ada tenaga kerja dibawah umur. Capaian IKK tahun 2014 sebesar 0% atau sama dengan realisasi tahun 2013.

- 5) Indikator keenam dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Merupakan perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 29.213 dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 48.244. Capaian kinerja indikator ini sebesar 60,55 % atau mengalami penurunan sebesar 0,7% dibanding tahun 2013 sebesar 61,25%.

- 6) Indikator ketujuh dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Berdasar data Kasus KDRT yang ditangani Women Crisis Center (WCC) Kota Magelang tahun 2014 sebanyak 39 kasus atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 51 kasus. Dari 39 kasus tersebut, khusus kasus warga/penduduk Kota Magelang sebanyak 25 kasus. Dari 25 kasus tersebut yang telah dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus dengan capaian IKK yang ditargetkan sebesar 76% terealisasi 32%.
- 7) Indikator kedelapan dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Jumlah PKK Aktif yang ada di Kota Magelang. Jumlah TP-PKK di Kota Magelang sejumlah 211 dengan rincian 1 TP-PKK tingkat Kota Magelang, 3 di tingkat Kecamatan, dan 17 di tingkat kelurahan, serta 190 kelompok PKK tingkat RW yang aktif untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang sehingga nilai capaian kinerja untuk PKK Aktif sebesar 100,00%.
- 8) Indikator kesepuluh dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata-laksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit. Dari 25 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 1 kasus yang harus mendapatkan layanan kesehatan (beupa visum). Dari 1 kasus tersebut telah terlayani sehingga capaian IKKnya sebesar 100%.
- 9) Indikator kesebelas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Dari 25 kasus perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 1 orang yang harus mendapat layanan rehabilitasi sosial dan telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, atau capaian IKK sebesar 100%.
- 10) Indikator keduabelas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 1 orang yang harus mendapat layanan bimbingan rohani dan telah tercapai 100 %.
- 11) Indikator ketiga belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari 25 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 5 kasus sampai pada penanganan hukum dan seluruhnya dalam proses sehingga capaian IKK sebesar 100%.
- 12) Indikator keempat belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, Dari 25 kasus perempuan dan anak

korban kekerasan, 5 kasus sampai pada penanganan hukum semuanya telah mendapat layanan bantuan hukum, sehingga capaian IKK sebesar 100%.

13) Indikator kelima belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemulangan artinya proses pengembalian korban kekerasan kepada keluarga, dan dari 25 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 1 kasus yang harus mendapatkan layanan pemulangan dan seluruhnya sudah terlayani, sehingga capaian IKK sebesar 100%.

14) Indikator keenam belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Indikator ini hampir sama dengan indikator nomor enam belas, namun tidak hanya kepada keluarganya, juga integrasi sosial dengan lingkungannya dan dari 51 kasus perempuan dan anak korban kekerasan, 1 kasus yang harus mendapat layanan reintegrasi sosial dan semuanya dapat kembali ke keluarga dan lingkungan dengan baik, sehingga capaian IKK sebesar 100%.

15) Indikator ketujuh belas dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas. Jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas yang sudah mempunyai kemampuan baca tulis di Kota Magelang pada tahun 2014 tercatat sebanyak 51.313 orang dari 53.277 orang perempuan usia lebih dari 15 tahun. Sehingga nilai capaian untuk indikator ini mencapai 96,31%.

d. Bahwa kasus KDRT di Kota Magelang tahun 2014 ini masih relative tinggi meskipun jumlahnya telah menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan tujuan dibentuknya keluarga, kurangnya komitmen kedua orang tua serta awal dari pembentukan sebuah keluarga dikarenakan keadaan yang memaksa seseorang untuk membentuk sebuah keluarga (dari kasus pelecehan seksual, dsb). Sehingga bias dikatakan menjadi mata rantai yang tidak mudah untuk diputuskan.

e. Bahwa pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 tahun 2012 tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Magelang serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Magelang. Harapannya dengan ditetapkannya perda ini, dapat mengurangi kasus KDRT.

Namun demikian SKPD BPMPKB agar lebih intensif dalam mensosialisasikan Perda ini serta terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan terjadinya KDRT.

Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada warga masyarakat khususnya yang rentan terjadi kasus KDRT.